



TIM PENYUSUN KAJIAN DAERAH PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT DI PROVINSI GORONTALO

Penanggung Jawab : Syarif Mbuinga, SPd.I, MM
(Bupati Pohuwato)

Pengarah : Dr. H. Syamsu Qamar Badu, MPd
(Rektor Universitas Negeri Gorontalo)

Penyusun :

- Prof. Dr. Yulianto Kadji, MSi (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Ketua/Guru Besar Kebijakan Publik dan Pembangunan)
- Dr. Rosman Ilato, MPd (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Wakil Ketua/Doktor Ekonomi Pembangunan)
- Nurdin, SP, MSi (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Sekretaris/Ahli Evaluasi Sumberdaya Lahan)
- Prof. Dr. Asna Aneta, MSi (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Anggota/Ahli Ekonomi Regional)
- Hais Dama, SE, MSi (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Anggota/Ahli Ekonomi)
- Heldi V. Alam, SPd, MSi (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Anggota/Ahli Manajemen Agribisnis)
- Harun Blongkod, SPd, SE.Ak, MSA (*Universitas Negeri Gorontalo*)
(Anggota/Ahli Akuntansi)

Setting/Layout : Jamaris Rivai
Sekretariat :



Alamat:

Pemda Kab. Pohuwato : Jl. Trans Sulawesi Marisa

Tim Penyusun : Kampus Jambura Universitas Negeri Gorontalo Gedung
Rektorat Lt.2 Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96122,
Provinsi Gorontalo.

Contact Person

Prof. Dr. Yulianto Kadji, MSi (hp. 081340190007); Nurdin, SP, MSi (hp. 081340579313,
email. nurdin@ung.ac.id); Drs. Djainuri Kundji (08124311333).





KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN KAJIAN DAERAH

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kajian daerah **Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat** ini dapat diselesaikan. Kajian ini terdiri dari kelayakan teknik dan fisik kewilayahan yang dimiliki wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat untuk menjadi sebuah daerah otonom, serta keunggulan wilayah yang didukung potensi pengembangannya di masa mendatang. Dokumen ini disusun berdasarkan data yang tersedia baik primer maupun sekunder dari berbagai sumber data resmi, terpercaya dan tersedia (instansi terkait). Kajian ini berisi berbagai informasi kemampuan dan potensi yang ada yang nantinya menjadi bahan kajian mendalam bagi upaya pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat. Calon kabupaten ini meliputi lima kecamatan, yaitu **Kecamatan Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan Kecamatan Wanggarasi**.

Dokumen ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi berbagai pihak, terutama pihak eksekutif dan legislatif, baik yang ada di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo, maupun pihak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri, DPD RI dan DPR RI. Di samping itu, sebagai upaya strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah Gorontalo Barat secara keseluruhan agar sejajar dengan daerah tetangga yang telah lebih maju. Penyusunan dokumen kajian daerah pembentukan kabupaten ini mengacu pada Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Pembentukan dan Penggabungan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3 dan PP No. 78 Tahun 2007.

Demikian dokumen ini dibuat dan diajukan, semoga semua pihak terutama pengambil kebijakan dapat memberikan penilaian yang arif dan bijaksana. Semoga Allah SWT memberkahi perjuangan pembentukan kabupaten ini.

Ketua,

Prof. Dr. Yulianto Kadji, MSi
NIP. 19670713 1998031001

Gorontalo, 30 Juli 2011
Sekretaris,

Nurdin, SP, MSi
NIP. 19800419 2005011003





SAMBUTAN BUPATI POHUWATO

Dengan adanya kajian daerah pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat ini, maka semua pihak akan memiliki data dan informasi yang cukup memadai, relevan, dan terukur sebagai potret awal dan estimasi perkembangan ke depan wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Oleh karena itu, saya mengharapkan semua pihak yang berkompeten dapat menilai, mengevaluasi dan memanfaatkan hasil studi kelayakan ini sebagai bagian dari kebutuhan rencana dan perencanaan secara sistimatis, menyeluruh dan terpadu terkait pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat. Saya menyambut dengan gembira dan apresiasi yang tinggi terhadap tersusunnya kajian daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat, karena ini merupakan salah satu bagian intergral dan tidak terpisahkan dalam pembentukan sebuah daerah otonom baru (kabupaten).

Kepada tim penyusun kajian daerah pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, saya menghaturkan terima kasih atas hasil yang telah dicapai. Saya menekankan agar kerjasama yang baik dan bersinergis antara segenap instansi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Akhirnya saya berharap agar dokumen kajian daerah pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat ini dapat dijadikan pertimbangan strategis dan ilmiah dalam pembentukan calon kabupaten ini. Selamat berjuang dan sukses.

Marisa, Juli 2011

Bupati,

Syarif Mbuinga, SPdI, MAg





DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN KELAYAKAN AKADEMIK.....	ii
KATA SAMBUTAN BUPATI GORONTALO	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-Isu Strategis	3
1.3 Landasan Operasional	4
1.4 Tujuan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Ruang Lingkup Kajian	5
1.4.1 Kajian Persyaratan Teknis dan Fisik Wilayah	5
1.4.2 Kajian Keunggulan Wilayah Calon Kabupaten	6
1.5 Luaran (<i>Output</i>)	6
1.6 Sistematika Penyajian	7
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH CALON KABUPATEN	8
2.1 Aspek Geografis Wilayah	8
2.1.1 Letak Geografis	8
2.1.2 Aksesibilitas Wilayah	8
2.1.3 Kondisi Tipologi Wilayah	9
2.2 Aspek Administrasi Pemerintahan	13
2.3 Aspek Biofisik Wilayah	15
2.3.1 Iklim dan Hidrologi	15
2.3.2 Geologi dan Jenis Tanah	16
2.3.3 Penggunaan Lahan	18
2.3.4 Keragaan Sektor Pertanian	20
2.3.5 Keragaan Sektor Kelautan dan Perikanan	22
2.4 Kependudukan.....	23
2.4.1 Jumlah Penduduk	23
2.4.2 Kepadatan Penduduk	23
2.5 Aspek Sosial Budaya	24
2.5.1 Pendidikan	24
2.5.2 Kesehatan	25
2.5.3 Keagamaan	26
2.6 Aspek Sosial Politik	27
2.7 Aspek Perekonomian Wilayah	27





BAB III. KAJIAN PERSYARATAN TEKNIS PEMBENTUKAN	
KABUPATEN GORONTALO BARAT	31
3.1 Rasionalisasi Kajian	31
3.2 Metodologi dan Pendekatan	32
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.2 Teknik Analisis Data	35
3.3 Hasil dan Pembahasan	42
3.3.1 Persyaratan Teknis	42
3.3.2 Persyaratan Fisik Kewilayahan	63
3.4 Kesimpulan	70
BAB IV. KAJIAN KEUNGGULAN WILAYAH	
DAN ANALISIS SWOT CALON KABUPATEN	71
4.1 Keunggulan Wilayah	71
4.1.1 Rasionalisasi Kajian	71
4.2.1 Metodologi dan Pendekatan	72
4.3.1 Hasil dan Pembahasan	72
4.3.1.1 Keunggulan Komparatif Wilayah	72
4.3.2.1 Keunggulan Kompetitif Wilayah	73
4.4.1 Kesimpulan	76
4.2 Analisis SWOT	76
BAB V. PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82





DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Aksesibilitas menuju Lokasi Calon Kabupaten Gorontalo Barat	9
2.	Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Gorontalo	13
3.	Jumlah Desa, Ibukota dan Luas masing-masing Kecamatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	13
4.	Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato	13
5.	Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato Barat	14
6.	Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato Timur	14
7.	Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Lemito	14
8.	Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Wanggarasi	15
9.	Unsur Iklim Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	15
10.	Penggunaan Lahan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	18
11.	Keragaan Produktifitas Tanaman Pangan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2009	20
12.	Keragaan Produktifitas Tanaman Perkebunan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2009	21
13.	Keragaan Produktifitas Peternakan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2010	22
14.	Keragaan Rumah Tangga Perikanan, Armada Tangkap, dan Produksi Perikanan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	23
15.	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat sampai Tahun 2009	23
16.	Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	24
17.	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) per Penduduk Usia TK (5-6 tahun).....	24
18.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Sederajat per Penduduk Usia SD (7-12 tahun).....	24
19.	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat per Penduduk Usia SLTP (13-16 tahun)	25
20.	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat per Penduduk Usia SLTA (17-19 tahun)	25
21.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	26
22.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	26
23.	Sarana Peribadatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	26
24.	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	27
25.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	27
26.	PDRB Non Migas Atas Harga Berlaku 2010	28
27.	PDRB Non Migas Atas Harga Konstan 2010	29





28. Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten di Wilayah Provinsi Gorontalo	29
29. Kontribusi PDRB Non Migas Masing-Masing Kabupaten terhadap PDRB Non Migas Provinsi Gorontalo	29
30. Persyaratan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru	31
31. Bobot Masing-Masing Faktor dan Indikator	38
32. Nilai Indikator dan Kelulusan suatu Daerah Otonom	39
33. Pedoman Penilaian Calon Ibukota Kabupaten Gorontalo Barat	40
34. Indikator Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain.....	43
35. Indikator Kepadatan Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	43
36. Indikator PDRB Non Migas per Kapita Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain.....	44
37. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	44
38. Indikator Kontribusi PDRB Non Migas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain terhadap PDRB Non Migas Provinsi	45
39. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	45
40. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	46
41. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	46
42. Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	47
43. Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	47
44. Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	48
45. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	48
46. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	49
47. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor di Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	49
48. Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	50
49. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	50
50. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	51





51. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	51
52. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	52
53. Indikator Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	52
54. Indikator Jumlah PDS terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	53
55. Indikator Jumlah PDS terhadap PDRB Non Migas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	53
56. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	54
57. Indikator Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	54
58. Indikator Jumlah Balai Pertemuan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	55
59. Indikator Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif terhadap Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	55
60. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	56
61. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	56
62. Indikator Luas Wilayah Efektif Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	57
63. Indikator Rasio Jumlah Personil Pertahanan di Calon Kabupaten Gorontalo Barat	57
64. Indikator Karakteristik Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	58
65. Indikator Rasio Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	59
66. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	60
67. Indikator Rata-Rata Jarak Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	61
68. Indikator Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	61
69. Rekapitulasi Faktor Persyaratan Teknis Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain	62
70. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman	64
71. Nilai Parameter Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman	65
72. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	66
73. Hirarki Pengembangan Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	67





74. Hasil Analisis Aspek Ruang Calon Kabupaten Gorontalo Barat	68
75. Hasil Analisis Aspek Jumlah Penduduk di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	68
76. Hasil Analisis Aspek Potensi Daerah di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	69
77. Hasil Analisis Aspek Aspek Sosial Budaya di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	69
78. Rekapitulasi Aspek Persyaratan Teknis Calon Ibukota di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat	69
79. Hasil Analisis <i>Location Quotions</i> Calon Kabupaten Gorontalo Barat Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (2000-2008)	73
80. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2007-2008) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat, Provinsi Gorontalo	74
81. Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2007-2008) di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat, Provinsi Gorontalo	75





DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Peta Adminitrasi Provinsi Gorontalo	10
2.	Peta Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo	11
3.	Peta Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo	12
4.	Sebaran Iklim dalam Setahun di Wilayah Calon Kabupaten	16
5.	Peta Geologi Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Sekitarnya	17
6.	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pohuwato	19





DAFTAR LAMPIRAN

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Data Dasar Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo (induk) dan Calon Kabupaten Gorontalo Barat	82
1.1.	PDRB Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2008 (Juta Rupiah)	82
1.2.	PDRB Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2008 (Jutaan Rupiah)	82
1.3.	PDRB Calon Kabupaten Gorontalo Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2008 (Juta Rupiah)	82
1.4.	PDRB Calon Kabupaten Gorontalo Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2008 (Jutaan Rupiah)	83
1.5.	PDRB Provinsi Gorontalo menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2008 (Juta Rupiah)	83
1.6.	PDRB Provinsi Gorontalo menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2008 (Juta Rupiah)	83
2.	Hasil Penilaian terhadap Faktor dan Indikator Pembentukan Kabupaten Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007	84
3.	Dokumentasi Kondisi Aktual Calon Kabupaten Gorontalo Barat	85





KAJIAN DAERAH

**PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT
DI PROVINSI GORONTALO**

B ab I. Pendahuluan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugroho (2000) bahwa "tidak ada daerah yang mampu mengelola dirinya sendiri, meski memiliki dukungan politik, organisasi, dan manusia, jika tidak memiliki kemampuan ekonomi. Semangat otonomi daerah yang didukung oleh kemampuan ekonomi ini kemudian bermuara pada keinginan daerah untuk memekarkan diri menjadi sebuah daerah otonom baru yang sebagaimana tertuang dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Ruang dan esensi melakukan pemekaran wilayah ini dilakukan dalam rangka pembangunan yang adil, makmur dan merata di seluruh sektor pembangunan.

Fitrani *et al.* (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakannya bahwa adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pembentukan daerah otonom baru pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam kerangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara utuh, sebagaimana teramanahkan dalam UU Dasar 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih penting dari semua itu, bahwa pembentukan daerah otonom baru bermuara pada utuh-kokohnya empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni:

- a. Tetap terpatrinya dan terpeliharanya ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Mengaktualisasikan eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia;
- c. Tetap utuhnya Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Tetap terjamin-mantapnya semangat persatuan dan kesatuan dalam dinamika **Bhinneka Tunggal Ika** (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).



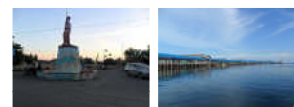


Pemekaran wilayah kabupaten merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Substansi pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal agar sesuai dengan potensi dan cita-cita daerah (Pramono 2006).

Kabupaten Pohuwato merupakan salah daerah otonom dalam wilayah administratif Provinsi Gorontalo yang dalam proses pembangunannya mengalami kemajuan dan perkembangan cukup signifikan, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Namun demikian, pada tingkat lapangan masih banyak masyarakat yang belum menikmati secara proporsional dampak pembangunan daerah. BPS Kabupaten Pohuwato (2010) melaporkan bahwa sampai tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pohuwato mencapai 21,15% dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Padahal upaya pengentasan kemiskinan merupakan hal terpenting dalam mengupayakan pencapaian MDGs (*millennium development goals*) sekaligus target nasional dan daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Tingkat pengangguran di Kabupaten ini sampai tahun 2009 masih sebesar 4,49%. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pohuwato sebesar 69,43 yang menempatkan kabupaten ini sebagai urutan ke empat kabupaten IPM tertinggi di Provinsi Gorontalo (BPS Kabupaten Pohuwato, 2010).

Selama ini, pelayanan optimal terhadap masyarakat masih sulit terpenuhi karena jarak dan waktu tempuh yang lama, sehingga sangat mempengaruhi rentang kendali pelayanan masyarakat. Data BPS Kabupaten Pohuwato (2010) menunjukkan bahwa jarak dari Marisa (ibu kota Kabupaten Pohuwato) menuju Lemito mencapai 69 km yang ditempuh dalam waktu $\pm 1,2$ jam perjalanan kendaraan bermotor, menuju Wanggarasi mencapai 46 km dalam waktu ± 1 jam, dan menuju Popayato mencapai 88 km dalam waktu $\pm 2,2$ jam. Hal ini diperparah dengan aksesibilitas dari dan menuju ke pusat pelayanan yang belum memadai.

Wilayah Gorontalo Barat mempunyai potensi sumberdaya wilayah yang cukup besar, baik sumberdaya alam (SDA), manusia (SDM), maupun sumberdaya teknologi yang dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari aspek SDA, sumberdaya lahan di wilayah ini mempunyai kelas kesesuaian lahan yang didominasi cukup sesuai sampai sangat sesuai untuk pengembangan





pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. Bahkan kawasan Teluk Tomini yang berada di wilayah Gorontalo Barat termasuk dalam Zona Pengembangan Program Minapolitan sebagai salah satu *pilot project*. Sumberdaya mineral juga menunjukkan potensi yang cukup besar, mulai dari jenis Sirtu, Toseki, Andesit dan Zeolit (BPS Kabupaten Pohuwato, 2010). Namun, pengelolaannya masih secara tradisional, bahkan ada yang belum dikelola sama sekali karena keterbatasan SDM dan IPTEK. Hal ini secara ekonomi menguntungkan bagi perekonomian wilayah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang tepat dan ramah lingkungan serta menguntungkan bagi kemaslahatan masyarakat di wilayah ini.

Aspek SDM wilayah ini, sampai tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sudah mencapai 116.227 jiwa dan 40.534 jiwa atau 53,55% berada di wilayah Gorontalo Barat. Beberapa fakta lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang minim serta jauhnya tempat bersekolah menjadi penyebab utama banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini cukup banyak sarjana dari wilayah ini yang bekerja pada berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segenap masyarakat Gorontalo Barat menyatukan tekad dan tujuan untuk membentuk sebuah kabupaten. Nama yang diusulkan adalah **Kabupaten Gorontalo Barat** di wilayah administratif Provinsi Gorontalo dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk bekerjasama dengan Tim Penyusun Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat telah menyusun dan mengusulkan pembentukan kabupaten melalui kajian akademik pembentukan kabupaten ini.

1.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Wilayah

Pembangunan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat tidak terlepas dari persoalan bagaimana mengoptimalkan komponen kekuatan, mereduksi kelemahan, memperbesar peluang dan mengubah tantangan menjadi kekuatan pembangunan yang saling terkait dan berinteraksi antara satu dan lainnya. Diperlukan titik pijak untuk menjadi *centroid*, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara terpadu dan berkelanjutan. *Centroid* yang dimaksudkan adalah isu-isu strategis pembangunan wilayah. Beberapa data dan fakta lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan dan disparitas pembangunan wilayah telah menimbulkan permasalahan yang cenderung melemahkan posisi strategis wilayah yang sebenarnya potensial dan produktif dalam menyumbang kinerja pembangunan





wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, kesadaran dan kesepahaman terhadap permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang mendesak untuk disepakati, terutama mendorong terwujudnya agenda strategis yang mendesak dilakukan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat, yaitu:

- a. Potensi sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan konservasinya mutlak dilakukan agar proses pembangunan wilayah berjalan optimal serta berkelanjutan.
- b. Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan salah satu kawasan perbatasan di Provinsi Gorontalo yang menjadi fokus pembangunan daerah dan Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis yang menjadi titik pijak pembangunan calon Kabupaten Gorontalo Barat adalah **“Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh melalui Optimalisasi Sumberdaya”**.

1.3 Landasan Operasional

Pembentukan Kabupaten ini didasarkan pada beberapa Landasan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo
- c. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
- f. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- h. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- i. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- k. PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- l. PP No 78 Tahun 2007 tentang kriteria Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan dan Pembentukan
- m. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- n. Surat Penunjukkan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No.1072/H47.A2.LL/2010 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat.
- o. Surat Keputusan Bupati Pohuwato No. 554/01.2/XII/2010 tentang Tim Penyusun Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat.





1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat ini, secara umum bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di semua sektor pembangunan agar tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat segera terwujud. Selain itu, sebagai upaya strategis dalam rangka mensejajarkan hasil pembangunannya dengan daerah lain dalam wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan nasional, sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dibentuknya Kabupaten Gorontalo Barat, yaitu:

- a. Optimalisasi kemampuan daerah dalam membangun wilayahnya sebagai kontribusi aktif terhadap pembangunan daerah Provinsi Gorontalo dan nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya, baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM), dan sumberdaya teknologi yang dimiliki daerah ini.
- c. Memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

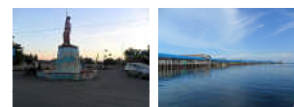
1.4 Ruang Lingkup Kajian Daerah

Ruang lingkup kajian daerah pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat ini terdiri dari:

1.4.1 Kajian Persyaratan Teknis dan Fisik Wilayah Calon Kabupaten

Pada bagian ini, aspek kajian yang dilakukan mengacu pada tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagaimana tertuang dalam PP No.78 tahun 2007 yang meliputi:

- a. Persyaratan Teknis
 1. Aspek kependudukan yang terdiri dari jumlah dan kepadatan penduduk wilayah.
 2. Aspek kemampuan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh produk domestik regional bruto (PDRB) non migas, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB non migas.
 3. Aspek potensi daerah yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana perbankan, pertokoan, pasar, sekolah, kesehatan, transportasi serta ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) pada masing-masing indikator tersebut.





4. Aspek kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS), rasio PDS terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB non migas.
 5. Aspek sosial budaya wilayah yang terdiri dari ketersediaan sarana peribadatan, olahraga dan balai pertemuan terhadap jumlah penduduk.
 6. Aspek sosial politik yang terdiri dari partisipasi penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu legislatif dan jumlah organisasi kemasyarakatan.
 7. Aspek luas daerah yang terdiri dari luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan.
 8. Aspek pertanahan dan kemandirian yang ditentukan berdasarkan ketersediaan personil terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk serta karakteristik wilayah.
 9. Aspek tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditentukan berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM).
 10. Aspek rentan kendali yang ditentukan berdasarkan jarak dan waktu tempu dari kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten ini.
- b. Persyaratan Fisik Wilayah
1. Cakupan wilayah berupa jumlah kecamatan di dalam wilayah calon kabupaten.
 2. Calon Ibu kota kabupaten.
 3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

1.4.2 Kajian Keunggulan Wilayah Calon Kabupaten

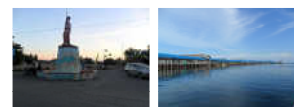
Pada bagian ini calon kabupaten ini dikaji keunggulan wilayahnya yang terdiri dari:

- a. Kesesuaian lahan untuk berbagai tipe penggunaan lahan.
- b. Keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah.
- c. Analisis SWOT Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat

I.5 Luaran (*Output*)

Kajian ini menghasilkan beberapa luaran, yaitu:

- a. Dokumen naskah akademik kajian daerah tentang pemenuhan persyaratan teknis dan fisik wilayah pembentukan calon Kabupaten Gorontalo Barat.
- b. Dokumen naskah akademik kajian keunggulan wilayah dan prospektivitas calon Kabupaten Gorontalo Barat.
- c. Peta cakupan wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat dan peta tematik lainnya.





1.6 Sistematika Penyajian

Penyajian hasil kajian akademik pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat ini disusun mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang dilaksanakannya kajian, isu-isu strategis, tujuan (umum dan khusus), keluaran (*output*), ruang lingkup kajian dan sistematika penyajian.

Bab II. Gambaran Umum Wilayah Calon Kabupaten

Bab ini diuraikan tentang posisi geografis dan administratif calon kabupaten, kondisi biofisik lahan yang berisi tentang kondisi topografi dan kelerengn wilayah, iklim dan hidrologi, geologi dan bahan induk tanah, landform dan fisiografi, jenis tanah dan distribusinya serta jenis penggunaan lahan. Sedangkan pada bagian akhir bab ini akan diuraikan tentang kondisi demografi, sosial, dan ekonomi wilayah.

Bab III. Kajian Persyaratan Teknis Pembentukan Kabupaten

Bab ini berisi tentang rasionalisasi kajian bagian ini, kemudian metodologi dan pendekatan yang digunakan. Pada bagian akhir disajikan hasil kajian daerah berdasarkan syarat teknis dan fisik pembentukan kabupaten. Cakupan wilayah (jumlah kecamatan) yang dituangkan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000, calon ibu kota kabupaten berdasarkan hirarki pengembangan wilayah, dan ketersediaan sarana-prasarana pemerintahan.

Bab IV. Kajian Keunggulan Wilayah dan Analisis SWOT Calon Kabupaten

Bab ini berisi tentang rasionalisasi kajian bagian ini, kemudian metodologi dan pendekatan yang digunakan. Pada bagian akhir disajikan hasil kajian daerah berdasarkan keunggulan wilayah calon kabupaten yang meliputi: hasil analisis kesesuaian lahan untuk berbagai tipe penggunaan lahan, keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah. Selanjutnya dapal perspektif analisis SWOT, dideskripsikan secara kualitatif tentang Kekuatan dan Kelemahan, serta Peluang dan Tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo Barat Provinsi Gorontalo

Bab V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian hasil kajian sebelumnya. Dan pada bagian akhir ditegaskan rekomendasi terntang percepatan pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat.





KAJIAN DAERAH

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT DI PROVINSI GORONTALO

B ab II. Gambaran Umum Wilayah



B AB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH CALON KABUPATEN GORONTALO BARAT

Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat memiliki karakteristik yang khas, baik dari aspek geografis, administratif, biofisik, demografi, ekonomi, sosial budaya dan aspek politik. Gambaran secara umum wilayah ini diuraikan sebagai berikut:

2.1 Aspek Geografis Wilayah

2.1.1 Letak Geografis

Kondisi wilayah ditinjau dari aspek geografis terletak diantara $0^{\circ} 18,5'$ LU sampai $0^{\circ} 48'$ LU dan $122^{\circ} 12,5'$ BT sampai $122^{\circ} 45'$ BT. Luas wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat adalah sekitar $1.790,40 \text{ km}^2$ (BPS Kabupaten Pohuwato, 2010) sebagaimana terlihat pada Gambar II-1, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.2 Aksesibilitas Wilayah

Pencapaian lokasi wilayah calon kabupaten ini mempunyai aksesibilitas yang cukup baik dengan jalur darat maupun laut. Lokasi wilayah calon kabupaten ini dapat dicapai melalui jalur darat yang melintasi sepanjang jalan trans sulawesi dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi jalan trans sulawesi yang relatif baik membuat perjalanan dari dan menuju wilayah ini relatif tanpa hambatan yang berarti. Kecuali itu, untuk mencapai lokasi di luar jalur jalan trans sulawesi masih banyak jalur jalan yang tidak memadai lagi untuk dilalui secara layak. Lokasi bandar udara Jalaludin Isimu yang relatif jauh dari wilayah ini ($\pm 246 \text{ km}$) menjadi satu-satunya akses melalui jalur udara menuju wilayah ini dari luar Gorontalo. Sedangkan jalur laut dapat ditempuh melalui tiga pelabuhan laut utama di Gorontalo, yaitu pelabuhan Samudera Anggrek dan pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, serta pelabuhan Kota Gorontalo. Uraian aksesibilitas wilayah ini disajikan pada Tabel 1.





Tabel 1. Aksesibilitas menuju Lokasi Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Jalur/Route	Jarak (km)	Waktu (jam)	Kondisi Jalan	Sarana/ Kendaraan
Jalur Darat:				
Manado-Isimu-Tilamuta-Marisa-Gorontalo Barat	125 Km	3 jam	Hotmix	Roda empat
Makasar-Palu-Moutong-Gorontalo Barat	86 Km	1,5 jam	Hotmix	Roda empat
Kota Gorontalo-Limboto-Isimu-Tilamuta-Marisa-Gorontalo Barat	2 Km	-	Hotmix	Roda dua/empat
Jalur Laut:				
Luar Gorontalo-Anggrek- Kwandang-Isimu-Tilamuta-Marisa-Gorontalo Barat		4-5 hari		Kapal laut
Luar Gorontalo-Kwandang- Isimu-Tilamuta-Marisa-Gorontalo Barat		4-5 hari		Kapal laut
Luar Gorontalo-Kota Gorontalo- Limboto-Isimu-Tilamuta-Marisa-Gorontalo Barat		6 hari		Kapal laut
Jalur Udara:				
Jakarta↔Makasar↔Isimu-Gorontalo Barat ¹⁾	-	4 jam	-	Pesawat: - Lion Air ^{a)} - Wings Air ^{c)} - Sriwijaya Air ^{a)} - Batavia Air ^{b)} - Garuda Indonesia ^{a)}
Jakarta↔Manado↔Isimu-Gorontalo Barat ²⁾		3 jam		

^{1.a)} penerbangan setiap hari; ^{1.b)} penerbangan tiga kali seminggu; ^{2.c)} penerbangan via manado.

2.1.3 Kondisi Tipologi Wilayah

Tipologi wilayah calon kabupaten ini berupa dataran sampai bergunung dengan kemiringan lereng 0->45% pada ketinggian 0->1500 m dpl. Wilayah ini merupakan bagian dari ekosistem daerah aliran sungai (DAS) Randangan dan DAS Popayato (Gambar 2) yang potensial untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan air tawar dan laut, serta sektor lainnya. Penataan dan alokasi pemanfaatan wilayah ini telah tertuang dalam RTRW Provinsi Gorontalo, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Alokasi pemanfaatan ruang yang cukup besar adalah pertanian lahan kering dan perkebunan, serta pengembangan persawahan. Hal ini cukup beralasan karena wilayah ini merupakan areal pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Disamping itu, lahan yang subur dengan intensitas panen 2 sampai 4 kali per tahun untuk setiap komoditi pertanian menjadi pertimbangan lain pengoptimalan sumberdaya yang ada di wilayah ini.

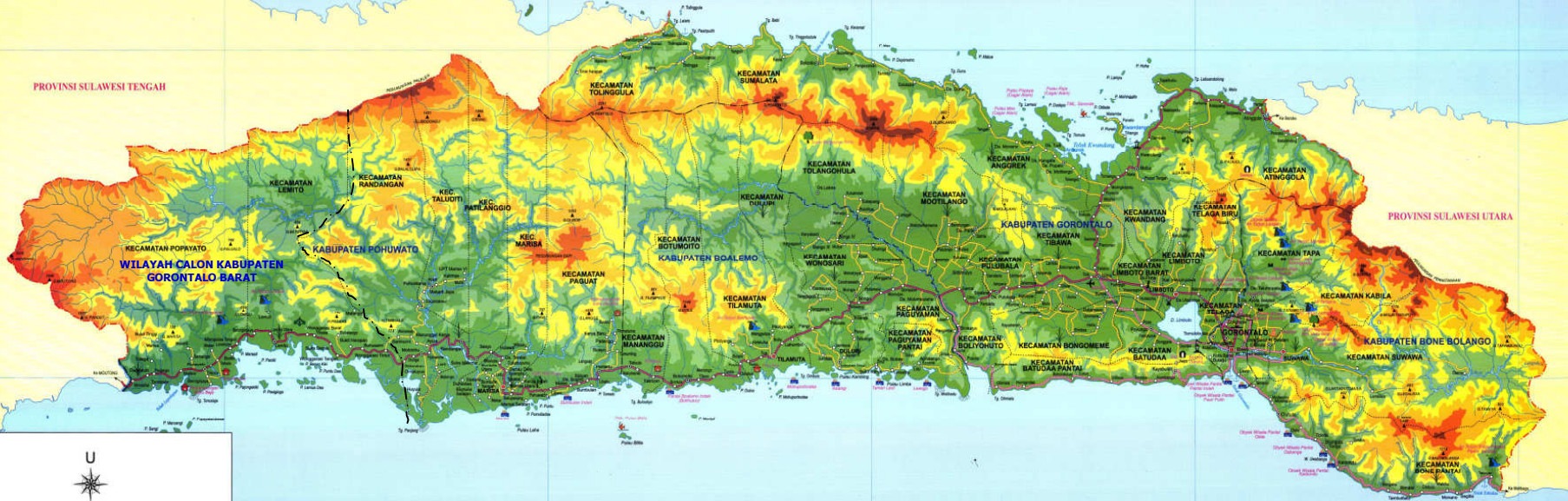
Berdasarkan peta status kawasan hutan Provinsi Gorontalo (Gambar 4), wilayah calon kabupaten ini didominasi oleh areal penggunaan lain (APL) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dengan demikian, dalam perencanaan pembangunan fisik wilayah nantinya sedikit kendala dari aspek status lahan (*land tenurial*) karena APL memungkinkan semua sektor pembangunan dapat dilaksanakan di dalamnya tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan.



L A U T S U L A W E S I



PROVINSI SULAWESI TENGAH



WILAYAH CALON KABUPATEN GORONTALO BARAT

PROVINSI SULAWESI UTARA

T E L U K G O R O N T A L O

U



SKALA 1 : 300.000



Proyeksi : Transverse Mercator

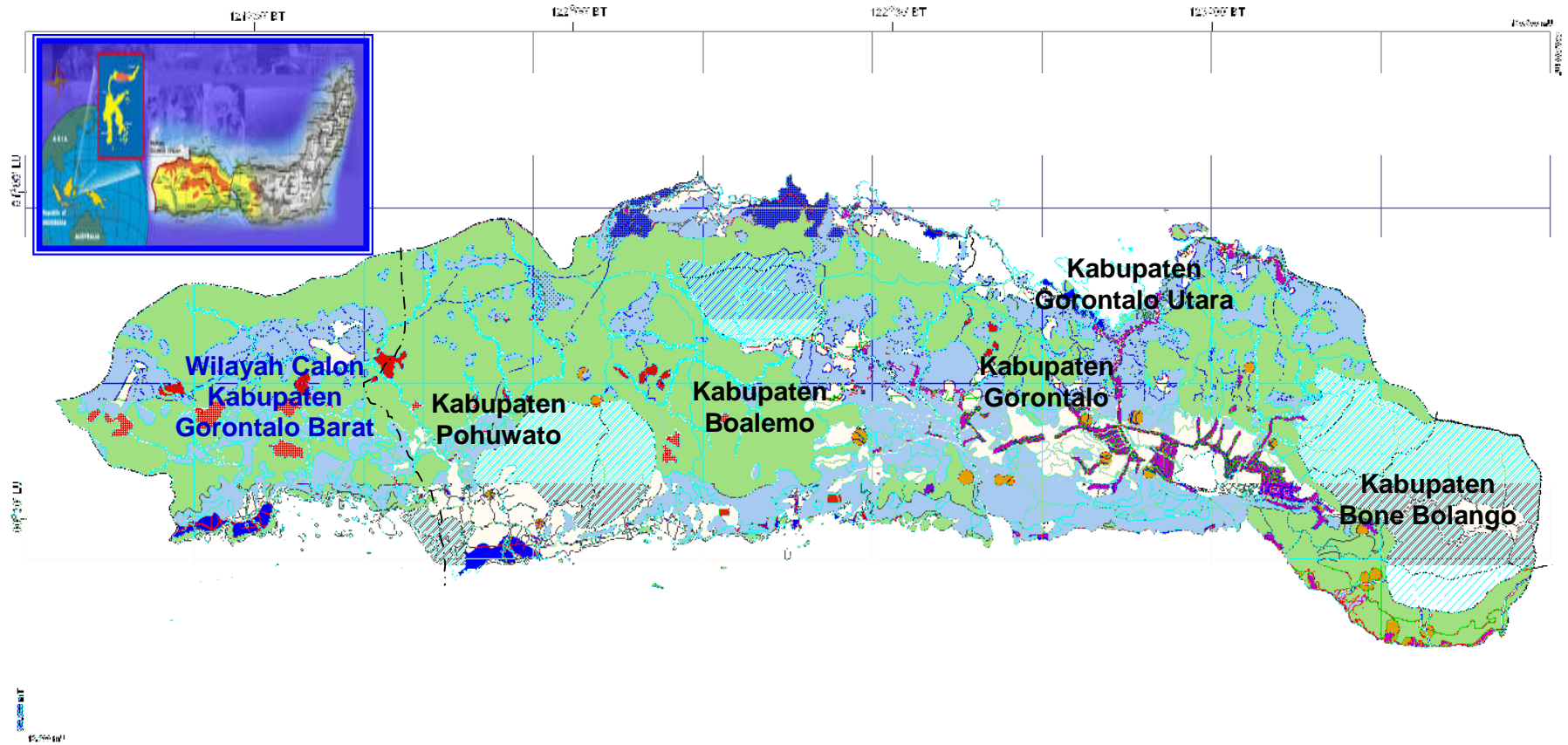
LEGENDA :

- | | | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | Kota Provinsi | | Jalan Lokal | | Makam |
| | Kota Kabupaten/Kota | | Saluran Drainase Tradisional | | Parkir Golf |
| | Kota Kecamatan | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Kota Lurah | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun Besar | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun Besar | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun Besar | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun Besar | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |
| | Dusun Besar | | Perikanan Laut (Perikanan) | | Pusat Industri |

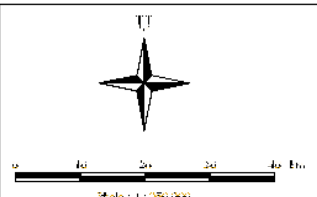
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO
2004

DUNIA
Grafis & Desain
Grafis & Desain
Grafis & Desain

PETA RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG PROVINSI GORONTALO



LEGENDA :

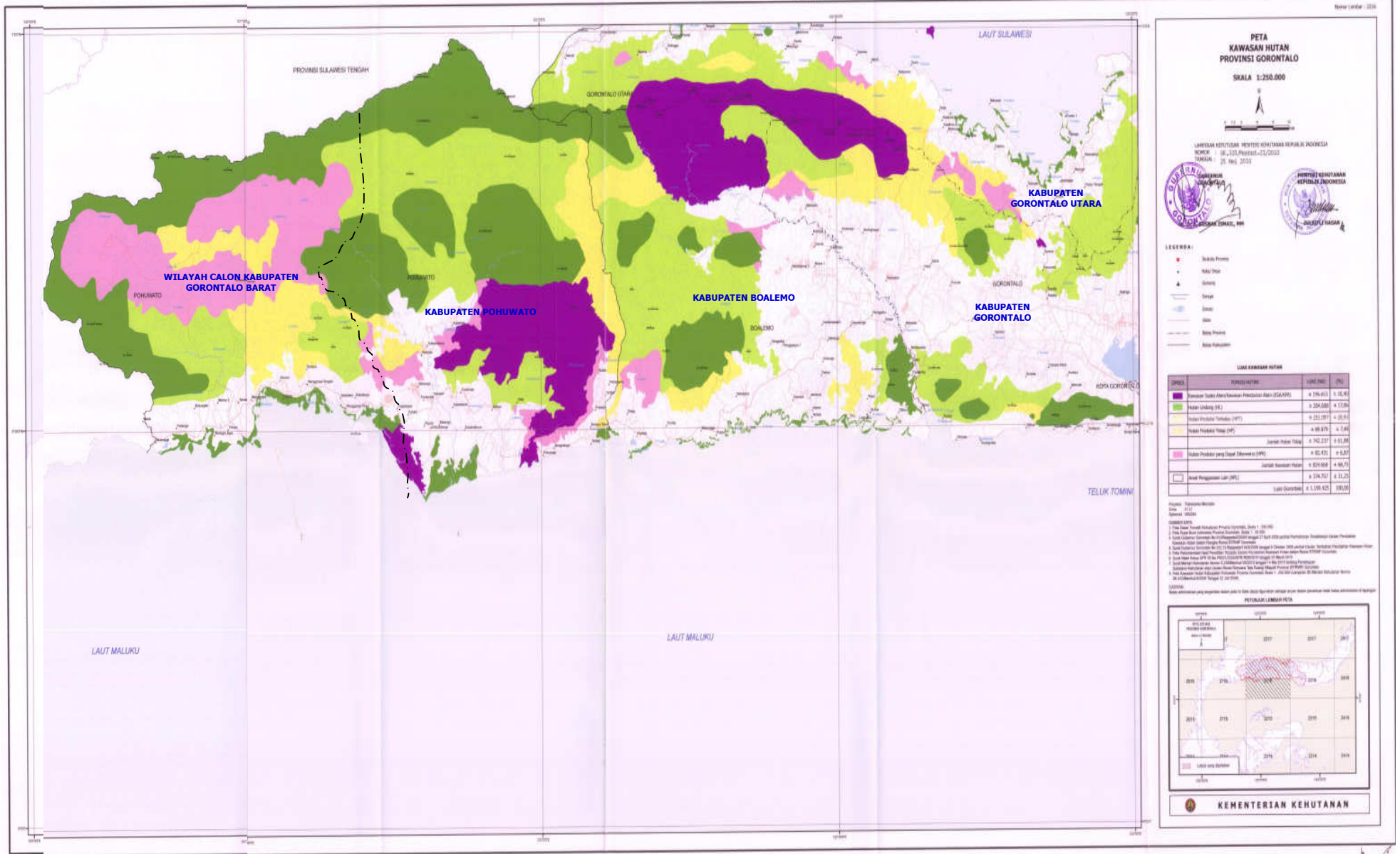


Ditinjau dan disetujui
 oleh :

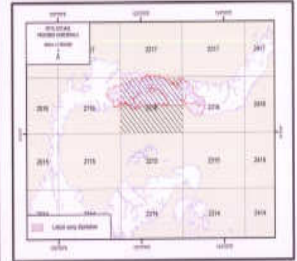
 Disusun oleh :
 1. Peta Rupa Bumi No. 11 Deyasa Tahun 1991
 2. Data Hasil Pengamatan, Pengukuran dan Survei
 Analisis Tata Ruang



BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2002
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2002 - 2018



Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato |
Tim Penyusun Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat



KEMENTERIAN KEHUTAN



2.2 Aspek Administrasi Pemerintahan

Sampai tahun 2010, jumlah kecamatan dan desa definitif yang ada di wilayah administrasi Provinsi Gorontalo masing-masing sebanyak 67 kecamatan dan 655 desa/kelurahan (Tabel 2). Untuk calon Kabupaten Gorontalo Barat terdapat lima kecamatan (Tabel 3). Dengan demikian, maka syarat minimal jumlah kecamatan yang harus dipenuhi untuk pembentukan sebuah kabupaten telah dipenuhi.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Boalemo	Tilamuta	2.567,36	7	84
2	Gorontalo ¹	Limboto	1.475,62	13	150
3	Pohuwato	Marisa	4.244,31	8	105
4	Bone Bolango	Suwawa	1.984,31	17	153
5	Gorontalo Utara	Kwandang	1.230,07	5	56
6	Gorontalo Barat ²		649,98	5	58
7	Kota Gorontalo	Gorontalo	64,79	6	49
Provinsi Gorontalo		Gorontalo	12.779,44	67	655

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang diusulkan

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka 2010 (BPS Provinsi Gorontalo, 2010).

Tabel 3. Jumlah Desa, Ibukota dan Luas masing-masing Kecamatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Desa
1	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	271,10	7
2	Lemito	Lemito	136,01	8
3	Popayato Timur	Maleo	723,74	7
4	Popayato	Popayato	80,57	10
5	Popayato Barat	Dudewulo	578,98	7
Total			1.790,40	39

Sumber: Kabupaten Pohuwato dalam Angka 2010 (BPS Kabupaten Pohuwato, 2010).

a. Kecamatan Wanggarasi

Wanggarasi merupakan satu dari empat kecamatan definitif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Saat ini, Kecamatan Wanggarasi terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah sekitar 271,10 km², sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Wanggarasi

No	Desa	Jarak dari Pusat Kecamatan (km)	Luas (km ²)
1	Wanggarasi Timur	1,0	19,58
2	Bukit Harapan	10,0	12,68
3	Bohusami	15,0	117,16
4	Lembah Permai	20,0	12,68
5	Limbula	2,0	42,00
6	Tuweya	14,0	40,00
7	Yipilo	5,0	27,00
Total			271,10

Sumber: Kecamatan Wanggarasi Dalam Angka 2010.





b. Kecamatan Lemito

Lemito merupakan salah satu kecamatan definitif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Saat ini, Kecamatan Lemito terdiri dari 8 desa (Tabel 5).

Tabel 5. Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Lemito

No	Desa	Jarak dari Pusat Kecamatan (km)	Luas (km ²)
1	Lemito	0,4	6,46
2	Lomuli	4,0	22,00
3	Lemito Utara	0,6	5,52
4	Wonggarasi Barat	0,7	21,34
5	Wonggarasi Tengah	3,0	35,10
6	Balobalonge	3,0	15,61
7	Kenari	0,6	12,88
8	Suka Damai	4,0	17,10
Total			136,01

Sumber: Kecamatan Lemito Dalam Angka 2010.

c. Kecamatan Popayato Timur

Popayato Timur merupakan satu kecamatan definitif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Saat ini, Kecamatan Popayato Timur terdiri dari 7 desa (Tabel 6).

Tabel 6. Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato Timur

No	Desa	Jarak dari Pusat Kecamatan (km)	Luas (km ²)
1	Maleo	1,5	3,26
2	Marisa	4,0	37,63
3	Tahele	3,0	282,32
4	Londoun	2,0	181,45
5	Bunto	3,0	26,65
6	Milangodaa	2,5	192,43
7	Kelapa Lima	8,0	*
Total			723,74

Sumber: Kecamatan Popayato Timur Dalam Angka 2010.

d. Kecamatan Popayato

Popayato merupakan satu kecamatan definitif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Saat ini, Kecamatan Popayato terdiri dari 10 desa (Tabel 7).

Tabel 7. Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato

No	Desa	Jarak dari Pusat Kecamatan (km)	Luas (km ²)
1	Popayato	0,5	7,00
2	Dambalo	5,0	8,70
3	Torosiaje	6,0	2,00
4	Torosiaje Jaya	7,0	4,60
5	Tunas Harapan	4,0	4,4
6	Trikora	2,5	10,00
7	Bukit Tinggi	2,5	20,65
8	Telaga Biru	1,5	7,7
9	Telaga	2,5	10,22
10	Bumi Bahari	5,5	5,3
Total			80,57

Sumber: Kecamatan Popayato Dalam Angka 2010.





e. Kecamatan Popayato Barat

Popayato merupakan satu kecamatan definitif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Saat ini, Kecamatan Popayato terdiri dari 7 desa (Tabel 8).

Tabel 8. Desa-Desa yang Terdapat di Kecamatan Popayato Barat

No	Desa	Jarak dari Pusat Kecamatan (km)	Luas (km ²)
1	Dudewulo	0,5	120,00
2	Butunggale	3,0	128,68
3	Tunas Jaya	3,5	3,56
4	Molosipat Utara	9,0	100,00
5	Padengo	4,0	20,06
6	Molosipat	7,0	70,00
7	Persatuan	6,0	136,68
Total			578,98

Sumber: Kecamatan Popayato Barat Dalam Angka 2009.

2.3 Aspek Biofisik Wilayah

2.3.1 Kondisi Iklim

Dari aspek iklim, curah hujan rerata tahunan dari stasiun iklim Popayato dan Randangan yang melingkupi wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebanyak 1.520,80 mm, sedangkan rerata bulanannya berkisar antara 65,50 sampai 168,50 mm (Tabel 9). Menurut tipe hujannya (Schmidt dan Ferguson, 1951) termasuk tipe A dan E dengan nilai $Q=10,20-119,04$ (Gambar 4).

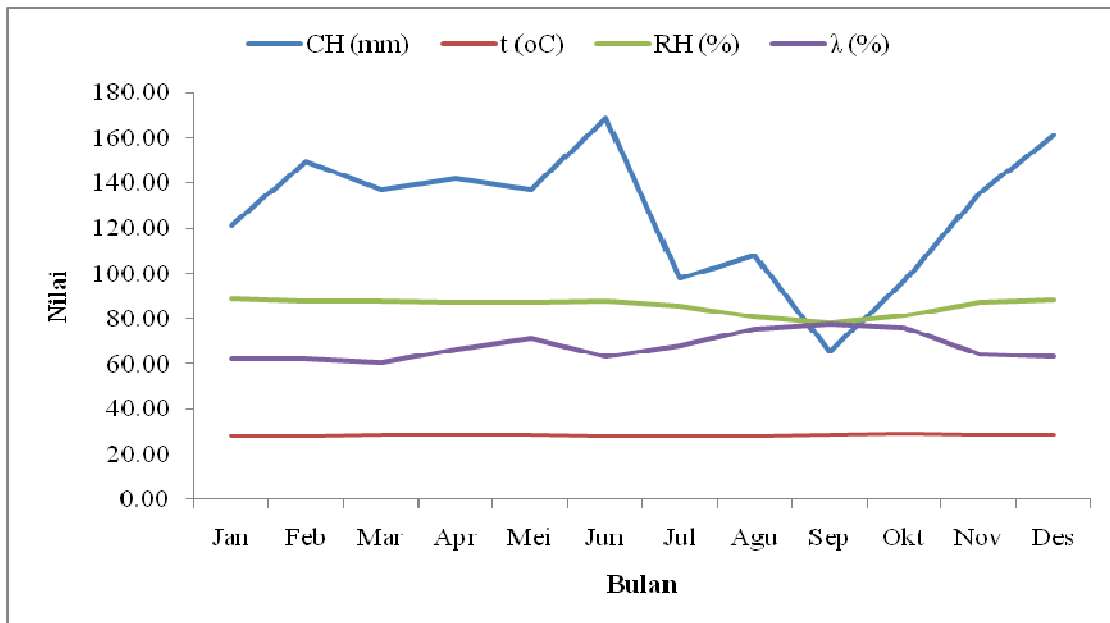
Tabel 9. Unsur Iklim Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Unsur Iklim	Bulan												Tahunan
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
CH (mm)	121,40	149,30	137,30	142,10	137,10	168,50	98,00	108,00	65,50	96,90	135,50	161,20	1.520,80
t (°C)	28,33	28,35	28,53	28,85	29,01	28,34	28,11	28,34	28,73	29,33	28,91	28,69	343,52
RH (%)	89,08	87,98	88,23	87,55	87,55	87,81	85,93	81,09	78,23	81,71	87,24	88,73	1.031,13
λ (%)	62,29	62,25	60,66	66,37	71,60	63,14	68,39	75,61	77,79	76,02	64,59	63,60	812,31

CH=curah hujan; t=suhu udara; RH=kelembaban relative; λ=panjang penyinaran matahari
Sumber: Stasiun Iklim Popayato dan Randangan (rekap data 1996-2005).

Rerata suhu udara bulanan berkisar antara 26 sampai 28 °C dengan rerata tahunan 27 °C (Tabel 9). Dari data tersebut terlihat fluktuasi suhu udara bulanan relatif kecil. Rerata lama penyinaran matahari bulanan bervariasi antara 39% (sekitar 4,8 jam/hari) sampai 52% (sekitar 6 jam/hari) dengan rerata lama penyinaran 46% atau 5 jam/hari. Rerata kelembaban udara relatif bulanan bervariasi antara 43% sampai 76% dengan rerata tahunan 64%.





Gambar 4. Sebaran Iklim dalam Setahun di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat (sumber: Stasiun Iklim Randangan dan Popayato 2010)

2.3.2 Geologi dan Jenis Tanah

Menurut peta geologi Sulawesi lembar Tilamuta skala 1: 250.000 (Bachri *et al.* 1993), wilayah calon kabupaten ini terdiri dari beberapa formasi geologi Aluvium (Qal); batuan gunungapi Pinogu (Tqpv) terdiri dari aglomerat, tuf dan lava; formasi Tinombo (Teot) terdiri dari batuan volkan, dan sedimen. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar 5.

Bahan induk tanah terdiri atas endapan alluvium sungai, alluvium marin, endapan sungai tua dan batuan gunung api. Landform daerah Wanggarasi sampai Popayoto secara umum digolongkan atas : 1) dataran alluvial yang terdiri atas alluvial marin, alluvial sungai, dan dataran aluvio-koluvial, 2) teras sungai tua (bekas aliran sungai Randangan), dan 3) perbukitan terdiri atas lipatan dan perbukitan intrusi. Dalam pemetaan tanah semi detail khusus di daerah Marisa/Popayoto, tanah diklasifikasikan sampai tingkat seri yang merupakan kategori terendah menurut system Soil Taxonomy (Soils Survey Staff, 1994). Di daerah tersebut terdapat enam ordo tanah, yaitu : Histosols, Entisols, Inceptisols, Vertisols, Mollisols, dan Alfisols. Ordo-ordo tersebut menghasilkan 46 famili tanah, dan 51 seri tanah (Djaenudin, 1995).





2.3.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di daerah penelitian dibedakan ke dalam penggunaan pertanian dan non-pertanian. Penggunaan pertanian terdiri dari pesawahan irigasi dan tadah hujan, tegalan, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa. Penggunaan non-pertanian terdiri dari semak belukar, hutan, dan pemukiman penduduk (Tabel 10).

Persawahan umumnya ditanami padi dua kali setahun dengan varietas lokal. Pada musim kemarau ditanami palawija (jagung, kedele, kacang hijau, kacang tanah). Pola tanam terdiri dari: padi-padi-pawija; padi-palawija-bera; palawija-plawija-bera; padi-bera-bera; palawija-bera-bera. Pertanian lahan kering terdiri dari tanaman pangan, seperti jagung, kedele, ubikayu, ubijalar, cabe, terung yang ditanam 1-2 kali setahun. Perkebunan tebu milik PT. PG Tolangohula dikelola secara modern. Pengolahan tanah dilakukan secara mekanis menggunakan alat berat, pemanenan dengan cara dibakar, dan ditebas yang selanjutnya diangkut ke pabrik. Penyebaran perkebunan tebu terpencar-pencar karena terhalang lahan pertanian penduduk. Sebagian lahan pertanian penduduk disewakan kepada pabrik. Perkebunan kelapa rakyat terpencar-pencar dan dikelola secara sederhana, yaitu kopra dikeringkan dan selanjutnya dipasarkan.

Tabel 10. Penggunaan Lahan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

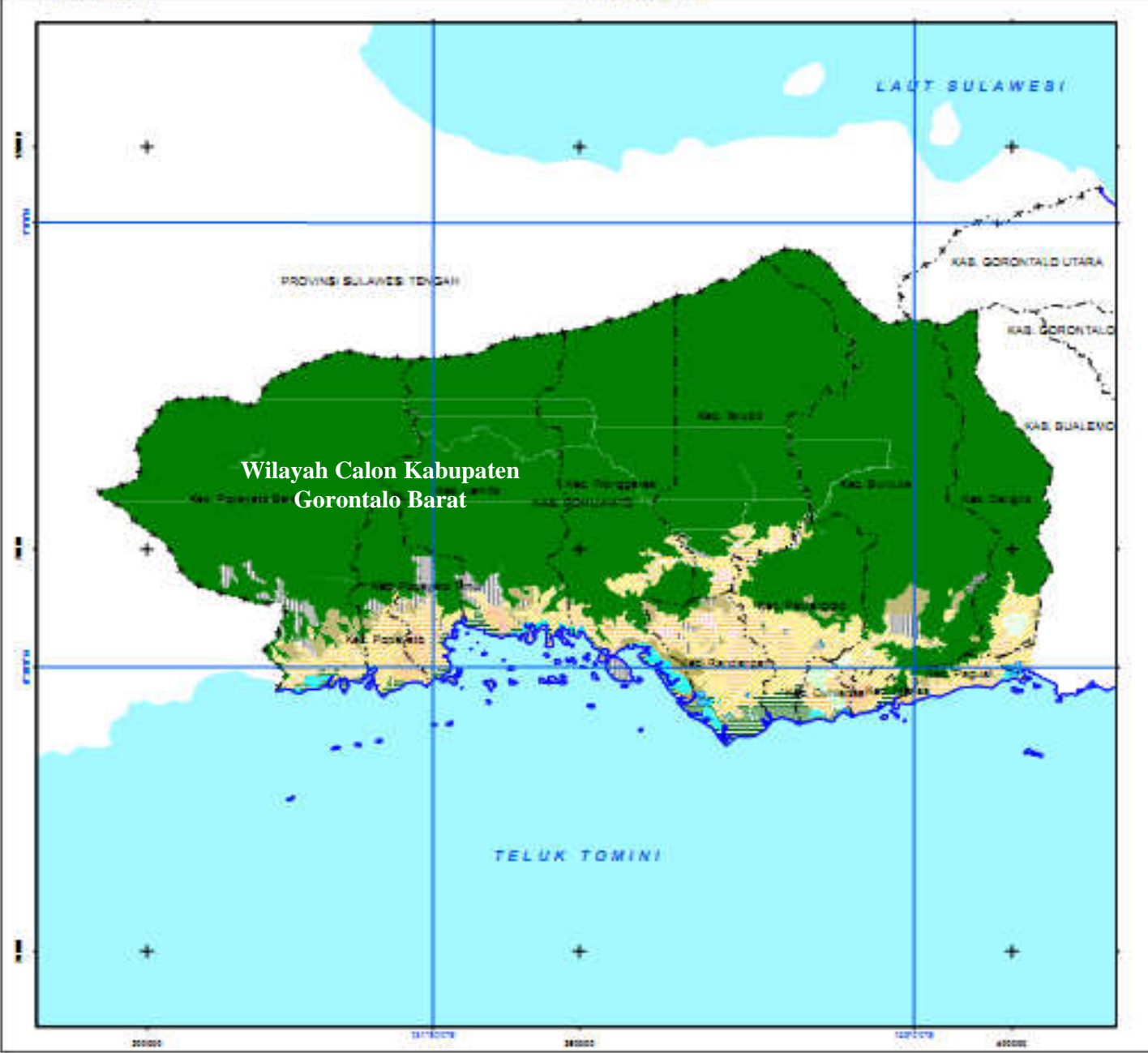
Kecamatan	Luas (km ²)	Luas Penggunaan Lahan (ha)								
		Pertanian				Hutan	Pemukiman	Rawa	Kolam	Lainnya
		Sawah	Tegal	Ladang	Kebun					
Wanggarasi	271,10	1.301	2.148	237	184	-	13.230	-	-	-
Lemito	136,01	1.891	3.742	2.891	3.827	2.920	2.398	121	7	403
Popayato Timur	723,74	2.646	3.629	3.684	4.902	3.302	2.419	3	3	513
Popayato	80,57	667	1.879	1.266	1.021	3.539	472	5	2	139
Popayato Barat	578,98	-	17	12	11	14	347	-	-	28
Gorontalo Barat ¹	1.790,40	6.51	11.42	8.09	9.95	9.78	18.87	129	12	1.083

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009

Secara garis besar, penggunaan lahan yang dominan adalah pemukiman sebesar 18,87 ha. Sedangkan penggunaan lahan yang paling kecil adalah kolam atau empang yang hanya sebesar 12 ha saja. Jika penggunaan lahan tersebut dibagi menjadi penggunaan utama, maka luas penggunaan lahan kering lebih dominan sebesar 86,23% dibanding lahan basah (sawah, kolam dan rawa) yang hanya sebesar 8,62% saja. Sedangkan sisanya merupakan hutan dan penggunaan lahan untuk lainnya.





KANTOR WILAYAH DAERAH PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI GORONTALO
 BIDANG SURvei PENDEKULAN DAN PEMETAAN
 KEMENTERIAN PERTANAHAN
 Jl. Jenderal Sudirman No. 212 Kota Gorontalo

**PETA PENGGUNAAN TANAH
 KABUPATEN PULAU WATU**

REKAMBUK LEMBAR PETA
 Nomor: 000000

LEGENDA

	Hutan		Air
	Lahan Pertanian		Perumahan
	Lahan Basah		Jalan
	Lahan Kering		Sungai
	Lahan Basah Berair		Saluran Irigasi
	Lahan Mandek		Batas
	Hutan		Batas
	Lahan Pertanian		Batas
	Lahan Basah		Batas
	Lahan Kering		Batas
	Lahan Basah Berair		Batas
	Lahan Mandek		Batas
	Hutan		Batas
	Lahan Pertanian		Batas
	Lahan Basah		Batas
	Lahan Kering		Batas
	Lahan Basah Berair		Batas
	Lahan Mandek		Batas
	Hutan		Batas
	Lahan Pertanian		Batas
	Lahan Basah		Batas
	Lahan Kering		Batas
	Lahan Basah Berair		Batas
	Lahan Mandek		Batas

PROJEKSI DAN SKALA

PROJEKSI	UTM
ZONASI	48Q
SKALA	1:100.000
UNIT	METER

SYMBOL

PROJEKSI

TRANSFORMASI PROJEKSI: UTM
 PROJEKSI: UTM
 ZONASI: 48Q

PROJEKSI DAN SKALA
 TRANSFORMASI PROJEKSI: UTM
 PROJEKSI: UTM
 ZONASI: 48Q



2.3.4 Keragaan Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor unggulan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan, beberapa komoditas pertanian menjadi komoditas unggulan daerah di provinsi ini. Komoditas jagung telah menjadi *entry point* dalam program Agropolitan di daerah ini yang diikuti oleh komoditas lain, seperti padi, cabai dan kelapa. Walaupun demikian komoditas lain juga menjadi pokok perhatian dengan pendekatan terintegrasi dan proporsional. Secara lebih detil keragaan (*performance*) capaian pembangunan sub sektor pertanian dari aspek produktifitas diuraikan sebagai berikut:

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan menjadi target utama pembangunan mengingat peranannya dalam menghasilkan sumber bahan pangan pokok masyarakat. Sampai tahun 2009, produksi padi di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mencapai 783,13 ton. Angka tersebut hanya disumbangkan oleh Kecamatan Popayato Barat, sementara kecamatan lain tidak ada sebab tidak memiliki areal persawahan (Tabel 11).

Tabel 11. Keragaan Produktifitas Tanaman Pangan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2009

Kecamatan	Luas (km ²)	Komoditi Tanaman Pangan (ton)							Total
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelei	Kacang Hijau	Kacang Tanah	
Wanggarasi	271,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemito	136,01	-	26.081,28	36,06	-	17,16	2,74	6,75	26.144
Popayato Timur	723,74	-	18.494,00	37,00	9.542,00	-	17,81	116,10	28.207
Popayato	80,57	-	20.110,00	170,00	170,00	-	27,00	344,00	20.821
Popayato Barat	578,98	783,13	23.785,71	-	-	-	-	13,60	24.582
Gorontalo Barat ¹	1.790,40	783,13	88.470,99	243,06	9.712,00	17,16	47,55	480,45	99.754,34

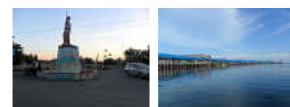
¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009

Komoditi jagung di wilayah ini mencapai 88.470,99 ton yang disumbangkan oleh Kecamatan Lemito sebanyak 26.081,28 ton sebagai contributor terbesar dan terendah tanpa produksi jagung oleh Kecamatan Wanggarasi (0 ton). Komoditi ubi kayu di wilayah ini mencapai 243,06 ton; ubi jalar 9.712 ton; kedelei sebanyak 17,16 ton; kacang hijau sebanyak 47,55 ton dan kacang tanah sebanyak 480,45 ton.

b. Sub Sektor Pertanian Tanaman Perkebunan

Kelapa merupakan salah satu komoditas yang menjadi prioritas pengembangan dalam program revitalisasi pertanian. Sampai tahun 2010, produksi kelapa wilayah ini sudah mencapai 221.949,34 ton (Tabel 12). Dari angka tersebut, kontribusi produksi padi





tertinggi diberikan oleh Kecamatan Popayato sebanyak 198.240 ton. Hal ini cukup beralasan karena wilayah ini sebagian besar merupakan sentra pengembangan perkelapaan di Provinsi Gorontalo, terutam di wilayah pesisir Teluk Tomini. Pengembangan kelapa di wilayah ini telah berjalan baik dengan sustainibilitas produksi kelapa yang relatif stabil. Selain itu, tahap peremajaan kelapa juga sementara digalakkan untuk meningkatkan produksi kelapa calon kabupaten ini. Hal lain juga adalah minat dan animo petani dalam budidaya kelapa sangat tinggi karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama petani di wilayah ini.

Tabel 12. Keragaan Produktifitas Tanaman Perkebunan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2009

Kecamatan	Luas (km ²)	Komoditi Perkebunan					
		Kepala	Mete	Kakao	Kopi	Kemiri	Cengkeh
Wanggarasi	271,10	804,00	9,00	47,00	1,01	-	1,16
Lemito	136,01	3.762,00	9,00	25,00	3,71	69,00	0
Popayato Timur	723,74	19.125,00	4.750,00	1.691,00	527,00	4.199,00	0,18
Popayato	80,57	198.240,00	854,00	4.854,00	294,00	12.000,00	0
Popayato Barat	578,98	18,34	0,23	1,10	0,08	0,49	0,05
Gorontalo Barat ¹	1.790,40	221.949,34	5.622,23	6.618,10	825,80	16.268,49	1,39

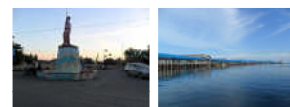
¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

Jambu mete sebagai salah satu komoditas bahan baku industri juga cukup baik perkembangannya. Sampai tahun 2010, produksi jambu mete sudah mencapai 5.622,23 ton. Dari angka tersebut, kontribusi produksi jambu mete tertinggi diberikan oleh Kecamatan Popayato Timur sebanyak 4.750 ton. Sedangkan kontribusi produksi terendah diberikan oleh Kecamatan Popayato Barat yang hanya sebanyak 0,23 ton saja. Produksi kakao terbanyak diberikan oleh Kecamatan Popayato dan terendah oleh Kecamatan Popayato Barat. Demikian halnya dengan komoditi kemiri.

c. Sub Sektor Peternakan

Sampai tahun 2010, produksi sapi di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mencapai 14.873 ekor, kambing 6.128 ekor, dan babi sebanyak 5.235 ekor (Tabel 13). Dari angka tersebut, kontribusi produksi sapi dan babi tertinggi diberikan oleh Kecamatan Popayato. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini merupakan sentra pengembangan sapi. Selanjutnya, kontribusi produksi kambing tertinggi diberikan oleh Kecamatan Lemito.





Tabel 13. Keragaan Produktifitas Peternakan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat Sampai Tahun 2009

Kecamatan	Luas (km ²)	Komoditi Ternak				
		Sapi	Kambing	Babi	Ayam Buras	Itik
Wanggarasi	271,10	3.423,00	1.248,00	828,00	8.659,00	261,00
Lemito	136,01	3.356,00	2.230,00	1.001,00	9.879,00	10.333,00
Popayato Timur	723,74	3.992,00	1.254,00	1.653,00	8.209,00	582,00
Popayato	80,57	4.102,00	1.396,00	1.753,00	11.545,00	219,00
Popayato Barat	578,98	-	-	-		
Gorontalo Barat¹	1.790,40	14.873,00	6.128,00	5.235,00	38.292,00	11.395,00

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

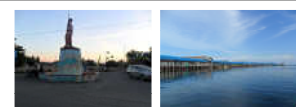
2.3.5 Keragaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan yang ditempuh sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009 pada sektor perikanan adalah mendorong diversifikasi, peningkatan produktivitas, dan nilai tambah produk perikanan untuk perbaikan kesejahteraan nelayan. Secara khusus untuk sektor perikanan, arah kebijakan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan penduduk pulau-pulau kecil, utamanya yang berada di perbatasan negara. Peningkatan kesejahteraan ditempuh secara holistik melalui keterpaduan kegiatan yang berfokus pada penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan salah satu program unggulan daerah adalah etalase perikanan. Program etalase perikanan di daerah ini telah sejak tahun 2002 dicanangkan.

Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan salah satu sentra pengembangan etalase perikanan dan saat menjadi salah satu pilot project pengembangan Program Nasional Minapolitan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Besaran capaian hasil dari program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Perikanan dan Armada Tangkap Ikan

Sampai tahun 2009, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) sudah mencapai 1.233 dan armada tangkap ikan sudah sebanyak 637 unit (Tabel 14). Dari angka tersebut, untuk RTP terbanyak diberikan oleh Kecamatan Popayato dan paling sedikit adalah Kecamatan Lemito. Sementara, untuk armada tangkap ikan terbanyak dan paling sedikit juga diberikan oleh Kecamatan Popayato. Hal ini cukup beralasan karena Kecamatan Popayato merupakan sentra pengembangan perikanan di Provinsi Gorontalo





Tabel 14. Keragaan Rumah Tangga Perikanan, Armada Tangkap, dan Produksi Perikanan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Rumah Tangga		Armada Tangkap Ikan	Produksi (ton)	
	Perikanan Laut	Perikanan Darat		Perikanan Laut	Perikanan Darat
Lemito	224	238	162	2052,3	1850,2
Popayato	566	205	475	3501,5	774,2
<i>Kabupaten Gorontalo Barat¹</i>	<i>790</i>	<i>443</i>	<i>637</i>	<i>5553,8</i>	<i>2624,4</i>

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Pohuwato dalam Angka 2009 (BPS Kabupaten Pohuwato, 2009).

2.4 Kependudukan

2.4.1 Jumlah Penduduk

Sampai tahun 2009, jumlah penduduk calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mencapai 40.053 jiwa (Tabel 15). Selanjutnya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Lemito (10.943 jiwa) dan paling sedikit adalah Kecamatan Wanggarasi (4.734 jiwa).

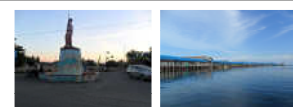
Tabel 15. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat sampai Tahun 2009

Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)
Wanggarasi	Wonggarasi Timur	271,10	128.495
Lemito	Lemito	136,01	340.470
Popayato Timur	Maleo	723,74	74.668
Popayato	Popayato	80,57	131.797
Popayato Barat	Dudewulo	578,98	96.506
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>Popayato</i>	<i>1.790,40</i>	<i>41.559</i>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

2.4.2 Kepadatan Penduduk

Sampai tahun 2009, rata-rata kepadatan penduduk calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mencapai 23 jiwa/km (Tabel 16). Selanjutnya, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Popayato (123 jiwa/km) dan paling sedikit adalah Kecamatan Popayato Timur yang hanya 11 jiwa/km. Jumlah rumah tangga di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sampai tahun 2009 sebanyak 10.957 rumah tangga. Jumlah rumah tangga paling banyak terdapat di Kecamatan Lemito dan paling sedikit di Kecamatan Wanggarasi.





Tabel 16. Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km)	Rumah Tangga
Wanggarasi	271,10	128.495	17	1.204
Lemito	136,01	340.470	80	2.826
Popayato Timur	723,74	74.668	11	2.125
Popayato	80,57	131.797	125	2.697
Popayato Barat	578,98	96.506	12	1.745
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>1.790,40</i>	<i>41.559</i>	<i>23</i>	<i>10.597</i>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

2.5 Aspek Sosial Budaya

2.5.1 Pendidikan

Informasi pendidikan yang ada di daerah calon Kabupaten Gorontalo Barat untuk pendidikan sekolah taman kanak-kanak (TK) paling banyak terdapat di Kecamatan Lemito dan Popayato (Tabel 17) dengan rasio terhadap jumlah penduduk usia TK (5-6 tahun) masing-masing sebesar 0,026 dan 0,033. Sementara yang paling kecil rasionya adalah Kecamatan Popayato Barat yang hanya sebesar 0,021 saja.

Tabel 17. Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) per Penduduk Usia TK (5-6 tahun)

Kecamatan	TK	Penduduk Usia TK (5-6 Tahun)	Rasio TK terhadap Usia TK
Wanggarasi	6	147	0,041
Lemito	9	341	0,026
Popayato Timur	6	211	0,028
Popayato	9	276	0,033
Popayato Barat	7	338	0,021
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>37</i>	<i>1.313</i>	<i>0,028</i>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD) sederajat paling banyak SD sederajat terdapat di Kecamatan Lemito dan Popayato, walaupun rasionya terhadap jumlah penduduk usia SD sederajat masih lebih kecil (0,006 dan 0,007) dibandingkan Kecamatan Wanggarasi dan Popayato Timur yang mencapai 0,012 dan 0,010. Dengan demikian, maka rata-rata rasio calon kabupaten ini hanya 0,008 saja.

Tabel 18. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Sederajat per Penduduk Usia SD (7-12 tahun)

Kecamatan	SD	Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)	Rasio
Wanggarasi	8	666,00	0,012
Lemito	10	1583,00	0,006
Popayato Timur	9	946,00	0,010
Popayato	10	1.459,00	0,007
Popayato Barat	7	1076,00	0,007
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>44</i>	<i>5.730</i>	<i>0,008</i>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.





Pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat (SLTP), jumlah SLTP terbanyak terdapat di Kecamatan Popayato Barat, tetapi rasionya terhadap penduduk usia SLTP masih di bawah Kecamatan Wanggarasi, walaupun jumlah SLTP sederajat lebih sedikit. Kecamatan sisanya jumlah SLTP sederajat paling sedikit dengan rasio yang hanya 0,006 sampai 0,013 saja.

Tabel 19. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat per Penduduk Usia SLTP (13-16 tahun)

Kecamatan	SLTP	Penduduk Usia SLTP (13-16 Tahun)	Rasio
Wanggarasi	3	232,00	0,013
Lemito	3	520,00	0,006
Popayato Timur	3	374,00	0,008
Popayato	3	307,00	0,010
Popayato Barat	4	324,00	0,012
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	16	1.757	0,009

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

Pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat (SLTA), jumlah sekolah SLTA sederajat paling banyak terdapat di Kecamatan Popayato, tetapi rasionya terhadap penduduk usia SLTA masih rendah dibanding Kecamatan Popayato Barat, sehingga Kecamatan ini rasionya paling rendah. Sedangkan rasio paling tinggi terdapat di Kecamatan Popayato Barat.

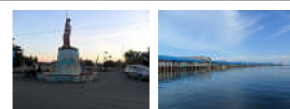
Tabel 20. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat per Penduduk Usia SLTA (17-19 tahun)

Kecamatan	SLTA	Penduduk Usia SLTA (16-19 Tahun)	Rasio
Wanggarasi	0	126	0,000
Lemito	2	327	0,006
Popayato Timur	0	131	0,000
Popayato	3	647	0,005
Popayato Barat	1	121	0,008
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	6	1.352	0,004

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

2.5.2 Kesehatan

Keadaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat meliputi: puskesmas, pustu, polindes, posyandu dan apotek/toko obat (Tabel 21). Jumlah sarana kesehatan paling banyak terdapat di Kecamatan Wanggarasi yang mencapai 21 unit. Sedangkan kecamatan dengan sarana kesehatan paling sedikit adalah Kecamatan Popayato Barat dengan persentase yang hanya sebanyak 12 unit saja.





Tabel 21. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
Wanggarasi	21	128.495	44,36
Lemito	14	340.470	12,79
Popayato Timur	20	74.668	25,22
Popayato	13	131.797	12,96
Popayato Barat	12	96.506	17,40
Kabupaten Gorontalo Barat	80	41.559	19,74

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

Untuk tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, dukun bayi terlatih dan petugas KB (Tabel 22). Jumlah tenaga kesehatan di wilayah calon kabupaten ini sudah mencapai 132 orang. Lemito merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak sebesar 36 orang. Sedangkan kecamatan paling sedikit adalah Popayato Barat yang hanya 10 orang saja.

Tabel 22. Jumlah Tenaga Kesehatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
Wanggarasi	28	128.495	59,15
Lemito	36	340.470	32,90
Popayato Timur	31	74.668	39,09
Popayato	27	131.797	26,92
Popayato Barat	10	96.506	14,50
Kabupaten Gorontalo Barat	132	41.559	32,57

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.

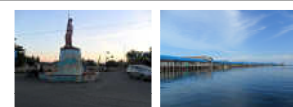
2.5.3 Keagamaan

Kehidupan beragama di wilayah calon Kabupaten ini diimplimentasikan dengan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda dan ditunjang oleh sarana peribadatan. Sampai tahun 2010, jumlah sarana ibadah di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mencapai 99 buah (Tabel 23). Dari angka tersebut, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lemito. Sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Popayato Barat.

Tabel 23. Sarana Peribadatan di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Mesjid	Mushola	Gereja	Pura	Wihara
Wanggarasi	13	-	4	-	-
Lemito	16	6	1	-	-
Popayato Timur	10	2	9	-	-
Popayato	15	2	4	-	-
Popayato Barat	12	4	1	-	-
Kabupaten Gorontalo Barat	66	14	19	-	-

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat) tahun 2009.





Jumlah penduduk di wilayah ini berdasarkan agama yang dipeluk sudah (Tabel 24), didominasi penduduk beragama islam sebanyak 37.191 jiwa. Penduduk beragama islam terbanyak terdapat di Kecamatan Lemito sebanyak 10.660 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Wanggarasi yang hanya 4.501 jiwa.

Tabel 24. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Penduduk (jiwa)					Jumlah
	Islam	Protestan	Katholik	Budha	Hindu	
Wanggarasi	4.501	276	5	-	-	4.782
Lemito	10.660	282	1	-	-	10.943
Popayato Timur	5.691	1.929	45	-	3	7.668
Popayato	9.771	245	11	-	4	10.031
Popayato Barat	6.568	37	-	-	-	6.605
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>37.191</i>	<i>2.769</i>	<i>62</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>40.029</i>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Barat) tahun 2009.

2.6 Aspek Sosial Politik

Kondisi iklim politik di wilayah ini cenderung menunjukkan peningkatan dalam partisipasi politik yang lebih baik (Tabel 25). Hal ini ditunjang oleh makin meningkatnya pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kedewasaan dalam berpolitik. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan rasio yang cukup menggembarakan yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio sebesar 0,99 di wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat.

Tabel 25. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Penduduk >17 tahun	Rasio
Wanggarasi	3.092	3.139	0,99
Lemito	6.749	6.820	0,99
Popayato Timur	5.118	5.173	0,99
Popayato	6.260	6.327	0,99
Popayato Barat	4.326	4.382	0,99
<i>Kabupaten Gorontalo Barat</i>	<i>25.545</i>	<i>25.841</i>	<i>0,99</i>

Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato (2010).

2.7 Aspek Perekonomian Wilayah

Indikator makro ekonomi salah satunya dihitung dengan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk melihat gambaran secara umum keadaan ekonomi wilayah atau daerah. Perhitungan PDRB umumnya ditentukan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Sampai tahun 2010, PDRB non migas ADHB calon Kabupaten Gorontalo Barat diduga mencapai Rp. 330.661,33 (Tabel 26). Sementara itu, Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk masih jauh lebih tinggi sebesar Rp.





705.783,67. Sektor utama penyumbang PDRB non migas ADHB tertinggi adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor yang paling rendah menyumbang nilai PDRB non migas ADHB adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

Tabel 26. PDRB Non Migas Atas Harga Berlaku tahun 2010 (Rp.000)

Sektor	Kabupaten					
	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Gorontalo Barat ¹
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	300.759,00	608.613,00	303.081,44	349.473,00	282.186,00	135.940,56
Pertambangan & Penggalian	5.329,00	23.724,00	4.049,31	6.746,00	15.956,00	2.852,69
Industri Pengolahan	28.281,00	119.708,00	38.477,48	102.233,00	21.029,00	18.191,52
Listrik, Gas & Air Bersih	3.221,00	7.029,00	4.850,68	2.873,00	2.991,00	2.293,32
Bangunan	54.861,00	111.268,00	20.666,84	45.958,00	19.543,00	35.513,16
Perdagangan, Hotel & Restoran	68.580,00	145.692,00	97.148,69	103.593,00	56.452,00	45.930,31
Pengangkutan & Komunikasi	26.771,00	176.781,00	24.538,57	29.239,00	14.646,00	11.601,43
Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	63.161,00	249.580,00	57.505,58	82.218,00	35.184,00	58.491,42
Jasa-Jasa	159.807,00	439.581,00	155.465,08	103.719,00	25.283,00	19.846,92
PDRB	710.770,00	1.881.976,00	705.783,67	826.052,00	473.270,00	330.661,33

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

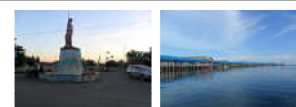
Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato (2010); BPS Provinsi Gorontalo (2010) diolah.

Tabel 27. PDRB Non Migas Atas Harga Konstan tahun 2010 (Rp.000)

Sektor	Kabupaten					
	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Gorontalo Barat ¹
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	122.194,00	226.761,00	150.166,22	85.607,00	107.542,00	67.353,78
Pertambangan & Penggalian	2.084,00	9.112,00	1.222,66	3.364,00	5.435,00	861,34
Industri Pengolahan	15.156,00	61.286,00	10.290,72	35.589,00	12.223,00	4.865,28
Listrik, Gas & Air Bersih	1.763,00	3.399,00	1.197,05	1.054,00	1.246,00	565,95
Bangunan	28.375,00	41.805,00	10.438,26	21.020,00	5.751,00	17.936,74
Perdagangan, Hotel & Restoran	45.305,00	72.460,00	30.761,48	26.022,00	30.358,00	14.543,52
Pengangkutan & Komunikasi	13.348,00	98.776,00	9.063,11	23.329,00	8.479,00	4.284,89
Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	29.419,00	97.919,00	14.584,49	37.726,00	16.251,00	14.834,51
Jasa-Jasa	53.110,00	185.234,00	47.097,46	30.305,00	9.711,00	6.012,54
PDRB	310.754,00	796.752,00	274.821,44	264.016,00	196.996,00	131.258,56

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo (2010); BPS Provinsi Gorontalo (2010) diolah.





Nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan (ADHK) calon Kabupaten Gorontalo Barat diduga sebesar Rp. 131.258,56 (Tabel 27). Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Pohuwato masih sebesar Rp. 274.821,44. Dengan demikian, maka keberadaan calon Kabupaten Gorontalo Barat ini tidak menyebabkan ekonomi kabupaten induk terpuruk.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besaran perubahan nilai PDRB ADHK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 (dugaan), calon Kabupaten Gorontalo Barat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang progresif sebesar 7,32%. Hal ini 0,4 kali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten induk (Kabupaten Pohuwato).

Tabel 28. Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten di Wilayah Provinsi Gorontalo

Kabupaten	2009
Boalemo	6,14
Gorontalo	7,48
Pohuwato	7,16
Bone Bolango	6,87
Gorontalo Utara	7,56
Gorontalo Barat ¹	7,32
Provinsi Gorontalo	7,54

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo (2010); BPS Provinsi Gorontalo (2010) diolah.

Berdasarkan nilai PDRB sebelumnya dari calon Kabupaten Gorontalo Barat, maka kontribusi calon kabupaten ini sampai tahun 2010 mencapai 4,67% terhadap nilai PDRB non migas Provinsi Gorontalo. Sementara Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk) memberikan kontribusi PDRB non migas sebesar 9,97%..

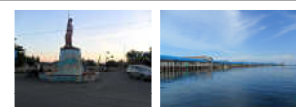
Tabel 29. Kontribusi PDRB Non Migas Masing-Masing Kabupaten terhadap PDRB Non Migas Provinsi Gorontalo

Kabupaten	PDRB non migas	Kontribusi PDRB Non Migas (%)
Boalemo	710.770.000	10,04
Gorontalo	1.881.976.000	26,57
Pohuwato	705.783.666	9,97
Bone Bolango	826.050.000	11,66
Gorontalo Utara	473.270.000	6,68
Gorontalo Barat ¹	330.661.334	4,67

¹ Calon kabupaten yang diusulkan

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo (2010); BPS Provinsi Gorontalo (2010) diolah.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan calon Kabupaten Gorontalo Barat secara umum turut memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Gorontalo dan secara faktual tidak memperpuruk perekonomian Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk. Dengan demikian, maka untuk perkembangan ekonomi wilayah yang lebih merata dan menjadikan wilayah yang cepat tumbuh di kawasan perbatasan Provinsi Gorontalo.





KAJIAN DAERAH

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT DI PROVINSI GORONTALO

B ab III. Kajian Persyaratan Teknis & Fisik Wilayah



B AB III KAJIAN PERSYARATAN TEKNIS PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT

3.1 Rasionalisasi Kajian

Pembentukan sebuah kabupaten baru harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PP No. 78 tahun 2007. Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari: (1) keputusan DPRD kabupaten induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (2) keputusan bupati induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (3) keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (4) keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, dan (5) rekomendasi Menteri.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 3 menegaskan bahwa suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Sedangkan Pasal 7 menyatakan bahwa syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Valuasi kelayakan wilayah Gorontalo Barat menjadi sebuah kabupaten harus memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2007, baik persyaratan administratif, teknis dan persyaratan fisik kewilayahan. Hal ini menjadi dasar valuasi selanjutnya oleh para pihak yang berwenang, baik pemerintah daerah (bupati/gubernur dan DPRD) di tingkat kabupaten dan provinsi, maupun pemerintah pusat (presiden c.q menteri dalam negeri dan DPR RI) untuk menetapkan apakah calon kabupaten ini layak untuk dimekarkan.





3.2 Metodologi dan Pendekatan yang Digunakan

Kajian valuasi calon kabupaten yang diusulkan dilakukan untuk memperoleh informasi kelayakan (*feasibility study*) daerah menjadi satu daerah otonom. Landasan valuasi kelayakan ini didasarkan atas faktor dan indikator yang tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2007 (Tabel 30).

Tabel 30. Persyaratan Teknis dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru

No	Faktor	Indikator	
1	Kependudukan	1	Jumlah Penduduk
		2	Kepadatan Penduduk
2	Kemampuan Ekonomi	3	PDRB non migas perkapita
		4	Pertumbuhan ekonomi
		5	Kontribusi PDRB non migas
3	Potensi Daerah	6	Rasio Bank dan Lembaga non keuangan bank per 10.000 penduduk
		7	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk
		8	Rasio pasar per 10.000 penduduk
		9	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD
		10	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP
		11	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA
		12	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk
		13	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk
		14	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor
		15	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga
		16	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
		17	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas
		18	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas
		19	Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk
4	Kemampuan Keuangan	20	Jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS)
		21	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk
		22	Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5	Sosial Budaya	23	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk
		24	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk
		25	Jumlah balai pertemuan
6	Sosial Politik	26	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif yang mempunyai hak pilih
		27	Jumlah organisasi kemasyarakatan
7	Luas Daeah	28	Luas wilayah keseluruhan
		29	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8	Pertahanan	30	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah
		31	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan





No	Faktor	Indikator	
9	Keamanan	32	Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	33	Indeks pembangunan manusia (IPM)
11	Rentang Kendali	34	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)
		35	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap masing-masing indikator yang dinilai, maka diuraikan definisi indikator, yaitu:

1. Indikator adalah suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.
2. Jumlah penduduk adalah penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Kepadatan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.
4. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.
5. PDRB non migas per kapita adalah nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.
6. Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.
7. Kontribusi PDRB non migas adalah persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi.
8. Potensi Daerah adalah potensi fisik dan non fisik dari suatu wilayah seperti penduduk, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial yang terukur (*tangible*).
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.





11. Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok.
12. Pasar adalah prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
13. Fasilitas Kesehatan adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik.
14. Tenaga medis adalah dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan yang dapat memberikan pengobatan baik praktek maupun tidak.
15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor adalah alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.
16. Pelanggan listrik adalah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah.
17. Pengguna air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk kebutuhan air minum.
18. Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten).
19. Sarana Peribadatan adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.
20. Fasilitas lapangan olah raga adalah tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).
21. Balai Pertemuan adalah tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
22. Penduduk yang ikut Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.
24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan adalah luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten.
25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.





26. Personil Aparat Pertahanan adalah aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.
27. Karakteristik Wilayah adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).
28. Rentang kendali adalah jarak rata-rata kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota kabupaten).
29. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari: Kecamatan Wanggarasi-Lemito-Popayato Timur-Popayato-Popayato Barat Dalam Angka (Tahun 2009), Kabupaten Pohuwato Dalam Angka (Tahun 2010), dan Provinsi Gorontalo Dalam Angka (Tahun 2010). Sumber data ini berasal dari instansi yang berwenang, seperti BPS Kabupaten Pohuwato dan BPS Provinsi Gorontalo. Selain itu, sumber data lain berasal dari publikasi yang resmi baik jurnal, laporan maupun buku lainnya yang relevan dan terkait dengan kajian ini.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui :

- a. Wawancara : Teknik pengambilan data primer ini langsung dilakukan melalui tanya jawab dengan responden baik dari unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, desa serta tokoh masyarakat. Proses perekaman data melalui angket atau kuisioner yang berisi daftar pertanyaan dan saran/komentar.
- b. Diskusi : Teknik ini dilakukan dengan cara seminar/lokakarya tentang potensi riil yang terdapat di wilayah calon kabupaten yang diusulkan dengan melibatkan langsung seluruh elemen-elemen masyarakat antara lain para pakar/ahli di bidangnya, organisasi kepemudaan/masyarakat/LSM, tokoh adat/agama, dan unsur pemerintah.
- c. Observasi : Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi data di lapang dan mendokumentasikan dalam bentuk visual dan non visual.

3.2.2 Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dipadukan secara deskriptif analitis. Penempatan masing-masing





teknik analisis ini disesuaikan dengan tujuan kajian ini serta kebutuhan masing-masing faktor dan indikator yang akan dilakukan penganalisisan.

a. Analisis Persyaratan Teknis

Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan metode penilaian/penghitungan terhadap 11 faktor persyaratan teknis dan 35 indikator sebagaimana tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Tabel 30). Cara perhitungan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk dihitung terhadap semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Kepadatan Penduduk dihitung dengan cara jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.
3. PDRB non migas perkapita dihitung dari nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.
4. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.
5. Kontribusi PDRB non migas calon kabupaten dihitung dengan cara menilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD dihitung dengan cara jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP dihitung dengan cara jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA dihitung dengan cara jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.





13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dihitung dengan cara jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga dihitung dengan cara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor dihitung dengan cara jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas dihitung dengan cara jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.
18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas dihitung dengan cara jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.
19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) dihitung dengan cara seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk dihitung dengan cara jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.
22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas dihitung dengan cara jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.
23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk dihitung dengan cara jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
25. Jumlah Balai Pertemuan dihitung dengan cara jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih dihitung dengan cara jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dihitung dengan cara jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.





28. Luas wilayah keseluruhan dihitung dengan cara jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan dihitung dengan cara jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah dihitung dengan cara jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
31. Karakteristik Wilayah dinilai melalui pencirian wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, tergantung hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut: a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan; b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai; c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan; dan d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk dihitung dengan cara jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
33. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan cara melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan AHH (angka harapan hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup. Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (rata-rata lama sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/ sedang diduduki..
34. Rata-rata jarak kabupaten/kota ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dihitung dengan cara jumlah jarak dari kabupaten/kota ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota.
35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan dihitung dengan cara jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota.

Penilaian yang digunakan adalah sistim skoring. Untuk pembentukan daerah otonom baru, metode skoring yang digunakan terdiri dari dua macam metode, yaitu: (1) Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya, dan (2) Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kriteria penilaian dengan metode kuota adalah kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan





seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya. Pemberian skor untuk pembentukan kabupaten menggunakan pembandingan kabupaten. Pembandingan kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal menentukan pembandingan kabupaten terdapat kabupaten yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (>5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 (sangat mampu), skor 4 (mampu), skor 3 (kurang mampu), skor 2 (tidak mampu) dan skor 1 (sangat tidak mampu).

Tabel 31. Bobot Masing-Masing Faktor dan Indikator (PP No. 78 Tahun 2007)

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	Jumlah Penduduk	15
	Kepadatan Penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	PDRB non migas perkapita	5
	Pertumbuhan ekonomi	5
	Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi Daerah	15
	Rasio Bank dan Lembaga non keuangan bank per 10.000 penduduk	2
	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia ≥ 18 tahun	1
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia ≥ 25 tahun	1
Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk	1	
4	Kemampuan Keuangan	15
	Jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS)	5
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial Budaya	5
	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif yang mempunyai hak pilih	3
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daeah	5
	Luas wilayah keseluruhan	2
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3





8	Pertahanan	5
	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	Indeks pembangunan manusia (IPM)	5
11	Rentang Kendali	5
	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	2
	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	3
Total		100

Nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata. Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator disajikan pada Tabel 31.

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagaimana tertera pada Tabel 32. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

Tabel 32. Nilai Indikator dan Kelulusan suatu Daerah Otonom

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007





Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

b. Analisis Persyaratan Fisik Wilayah

Persyaratan fisik wilayah terdiri dari cakupan wilayah, calon ibu kota dan sarana prasarana wilayah yang pada prinsipnya tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan PP No. 78 tahun 2007 (Tabel 33).

Tabel 33. Pedoman Penilaian Calon Ibukota Kabupaten Gorontalo Barat

Syarat Kriteria	Indikator	Sub Indikator
Aspek Ruang	1. Ruang	
	a. Calon ibukota kabupaten mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten baru	1. Jarak rata-rata calon Ibukota Kabupaten terhadap Ibukota
	b. Luas Wilayah memadai untuk mendukung aktifitas Sosial Ekonomi Budaya dan Politik kabupaten tersebut	2. Rasio luas lahan budidaya terhadap luas daerah
	c. Calon Ibukota Kabupaten memiliki pola interaksi yang produktif dengan wilayah hinterlandnya.	3. Jarak tempuh rata-rata calon Ibukota Kabupaten terhadap seluruh Ibukota Kecamatan
	d. Lokasi calon Ibukota Kabupaten secara fisik tidak berdekatan dengan Ibukota Kabupaten lain/ kota	4. Jarak tempuh dengan Ibukota Kabupaten lain yang terdekat
	e. Mempunyai akses yang baik terhadap potensi sumber daya air	5. Jarak Sumber Daya Air dengan pusat permukiman
	2. Luas Daerah	6. Luas wilayah keseluruhan 7. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
Jumlah Penduduk	3. Jumlah Penduduk	8. Jumlah Penduduk
	4. Sebagian besar jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor non pertanian	9. Rasio jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian/SDA dengan total penduduk calon kabupaten
	5. Tingkat pertumbuhan penduduk tidak minus	10. Tingkat pertumbuhan 11. Rasio jumlah PNS terhadap total jumlah penduduk
	6. Tenaga Kerja	12. Rasio tenaga kerja produktif terhadap total jumlah penduduk 13. Persentase penduduk bekerja
	Potensi Daerah	7. Sarana dan Prasarana Transportasi





Syarat Kriteria	Indikator	Sub Indikator	
		18. Jumlah mobil	
		19. Jumlah motor	
		20. Jumlah kapal motor	
		21. Jumlah perahu	
		8. Perumahan dan Permukiman	22. Jumlah Perumahan Dinas
			23. Jumlah Perumahan Pribadi
		9. Lembaga Keuangan	24. Jumlah bank
			25. Jumlah non bank
			26. Jumlah KUD
			27. Jumlah non KUD
		10. Sarana dan Prasarana Ekonomi	28. Jumlah pasar modern
			29. Jumlah pasar tradisional
			30. Jumlah toko
			31. Jumlah kios
		11. Sarana Pendidikan	32. Jumlah SD
			33. Jumlah SLTP
			34. Jumlah SLTA
			35. Jumlah Perguruan Tinggi
		12. Sarana Kesehatan	36. Jumlah rumah sakit
	37. Jumlah puskesmas		
	38. Jumlah puskesmas pembantu		
	39. Jumlah apotik/toko obat		
	40. Jumlah dokter		
	41. Jumlah paramedis		
13. Sarana Peribadatan	42. Jumlah masjid		
	43. Jumlah gereja		
	44. Jumlah pura		
	45. Jumlah sarana peribadatan lainnya		
14. Sarana Pariwisata	46. Jumlah hotel/akomodasi lainnya		
	47. Jumlah restoran/rumah makan		
	48. Jumlah obyek wisata		
15. Sarana Kegiatan Seni/ Institusi Sosial	49. Jumlah gedung kesenian		
	50. Jumlah panti sosial		
16. Sarana Olah Raga	51. Jumlah lapangan		
17. Sarana Komunikasi	52. Jumlah pelanggan telepon		
	53. Jumlah kantor pos		
	54. Jumlah kantos pos pembantu		
18. Sarana Penerangan	55. Jaringan listrik		
	56. Jumlah pelanggan listrik		
19. Prasarana dan Sarana Dasar	57. Fasilitas pelayanan air limbah		
	58. Jumlah fasilitas persampahan		
	59. Jumlah pelanggan air bersih		
Sosial Budaya	20. Organisasi Kemasyarakatan	60. Jumlah organisasi kemasyarakatan	
Lain-lain	21. Keamanan dan Ketertiban	61. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	
	22. Ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan	62. Jumlah gedung yang ada	
		63. Ketersediaan lahan untuk gedung pemerintahan	

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PP No.78 tahun 2007 (Dirjend Penataan Ruang Dept. PU).





Faktor calon ibukota kabupaten dan ketersediaan sarana-prasarana pemerintahan dianalisis dengan teknik hirarki pengembangan wilayah berdasarkan metode skalogram berdasarkan beberapa asumsi, yaitu: (1) penduduk mempunyai kecenderungan untuk bergerombol di suatu lokasi dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang secara relatif terbaik untuk komunitasnya., (2) daerah dengan fasilitas umum terlengkap merupakan pusat bagi daerah di sekitarnya, dan (3) fasilitas yang ada di seluruh sub wilayah merupakan fasilitas pokok dan fasilitas yang hanya di wilayah tertentu merupakan fasilitas penciri perkotaan. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel dengan asumsi bahwa masing-masing fasilitas mempunyai bobot dan kualitas yang bersifat *indifferent*. Selain metode skalogram, dilakukan komparasi dengan hasil analisis kesesuaian lahan terutama untuk pemukiman dan perkotaan. Hasil komparasi ini ditentukan kriteria calon ibukota kabupaten dengan skoring dan bobot yang tertinggi. Namun, sebelumnya dilakukan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan.

3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Persyaratan Teknis

a. Faktor Kependudukan

Penilaian faktor kependudukan terdiri dari dua komponen utama, yaitu indikator jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Pada semua indikator tersebut disajikan perbandingan nilai antara calon kabupaten dengan kabupaten induk dan kabupaten lainnya yang berdekatan di wilayah Provinsi Gorontalo.

1. Jumlah Penduduk

Untuk indikator jumlah penduduk, ternyata calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Pohuwato mempunyai nilai 45, sementara Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo (Tabel 34) mempunyai nilai tertinggi (75). Nilai terendah terdapat pada Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang hanya sebesar 30 karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Di samping itu, rendahnya nilai jumlah penduduk ini juga disebabkan oleh banyaknya kecamatan yang terdapat dalam kabupaten tersebut, sehingga semakin banyak kecamatan, maka semakin kecil rata-rata jumlah penduduk di kabupaten tersebut.





Tabel 34. Indikator Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Penduduk (jiwa)	Kecamatan	Rata-rata	Pembanding	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	128.495	7	18.356	91.782	5	15	75
Gorontalo	340.470	18	18.915	94.575	5	15	75
Pohuwato ¹	74.668	8	9.462	47.308	3	15	45
Bone Bolango	131.797	17	7.753	38.764	2	15	30
Gorontalo Utara	96.506	6	16.084	80.422	5	15	75
Gorontalo Barat ²	41.559	5	8.107	40.534	3	15	45
<i>Provinsi Gorontalo</i>		61	13.336				
<i>Quota</i>			66.680				

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk calon Kabupaten Gorontalo Barat ternyata menempati urutan terendah yang hanya 22,85 jiwa/km² dengan nilai 5 (Tabel 35). Sedangkan kabupaten dengan kepadatan terendah adalah Kabupaten Pohuwato dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sebanyak 31,33 jiwa/km² dan memperoleh nilai 5 saja. Kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 35. Indikator Kepadatan Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Luas (km2)	Kepadatan	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	128.495	494,66	259,75	66	4	5	20
Gorontalo	340.470	860,62	395,61	100	5	5	25
Pohuwato ¹	74.668	2.413,88	31,33	8	1	5	5
Bone Bolango	131.797	1.984,58	200,21	51	3	5	15
Gorontalo Utara	96.506	1.777,03	157,67	40	3	5	15
Gorontalo Barat ²	41.559	1.773,82	22,85	6	1	5	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

b. Faktor Kemampuan Ekonomi Daerah

1. PDRB Non Migas per Kapita

Salah satu cara menilai kemampuan ekonomi daerah yang merupakan indikator makro ekonomi ditentukan melalui penilaian produk domestik regional bruto (PDRB). Sementara, penilaian kemampuan ekonomi per kapita penduduk ditentukan berdasarkan PDRB non migas atas dasar harga berlaku tahun terakhir (Tabel 36).





Tabel 36. Indikator PDRB Non Migas per Kapita Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	PDRB non migas (Rp)	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per kapita (Rp)	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	710.770.000	128.495	5.531,499	59,32	3	5	15
Gorontalo	1.881.976.000	340.470	5.527,582	59,28	3	5	15
Pohuwato ¹	705.783.666	74.668	9.324,292	100,00	5	5	25
Bone Bolango	826.050.000	131.797	6.267,593	67,22	4	5	20
Gorontalo Utara	473.270.000	96.506	4.904,047	52,59	3	5	15
Gorontalo Barat ²	330.661.334	41.559	8.157,629	87,49	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Nilai PDRB non migas per kapita penduduk calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan nilai yang tertinggi sebesar Rp. 8.157.629 bersama dengan Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 9.324.292 terhadap nilai rata-rata PDRB non migas per kapita kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (nilai PDRB non migas per kapita sebesar Rp. 5.527.582. Dengan demikian, maka calon Kabupaten Gorontalo Barat bersama-sama Kabupaten Pohuwato memperoleh skor dan nilai untuk indikator ini paling tinggi, yaitu masing-masing 5 dan 25.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk) menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,32%. Tren kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini juga berlaku terhadap semua kabupaten definitif di wilayah Provinsi Gorontalo. Dari indikator pertumbuhan ekonomi ini, maka semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh skor paling tinggi (5) dengan nilai 25.

Tabel 37. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	2009	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	6,14	81,22	5	5	25
Gorontalo	7,48	98,94	5	5	25
Pohuwato ¹	7,16	94,71	5	5	25
Bone Bolango	6,87	90,87	5	5	25
Gorontalo Utara	7,56	100,00	5	5	25
Gorontalo Barat ²	7,32	96,83	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





3. Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDRB Non Migas Provinsi Gorontalo

Nilai PDRB non migas calon Kabupaten Gorontalo Barat terhadap PDRB non migas Provinsi Gorontalo sebesar 4,67% dan menempati urutan ke enam kontributor di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 38). Sedangkan Kabupaten Gorontalo merupakan kontributor paling tinggi sebesar 26,57% diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 11,66%.

Tabel 38. Indikator Kontribusi PDRB Non Migas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain terhadap PDRB Non Migas Provinsi

Kabupaten	PDRB non migas	Kontribusi PDRB Non Migas (%)	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	710.770.000	10,04	37,77	2	5	10
Gorontalo	1.881.976.000	26,57	100,00	5	5	25
Pohuwato ¹	705.783.666	9,97	37,50	2	5	10
Bone Bolango	826.050.000	11,66	43,89	3	5	15
Gorontalo Utara	473.270.000	6,68	25,15	2	5	10
Gorontalo Barat ²	330.661.334	4,67	17,57	1	5	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

c. Faktor Potensi Daerah

Potensi daerah terdiri dari potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur saja (*tangible*) dimasukkan dalam indikator tersedia (PP No. 78 tahun 2007).

1. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk

Indikator rasio bank dan lembaga keuangan non bank menunjukkan bahwa calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 8,63 dengan skor 5 dan nilai 10. Sementara, Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk memiliki rasio paling tinggi sebesar 10,44 dengan nilai 10 juga.

Tabel 39. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Bank	Jumlah Non Bank	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2	104	128.495	8,25	79,04	4	2	8
Gorontalo	14	271	340.470	8,37	80,20	5	2	10
Pohuwato ¹	8	71	74.668	10,44	100,00	5	2	10
Bone Bolango	5	97	131.797	7,74	74,15	4	2	8
Gorontalo Utara	4	71	96.506	7,77	74,46	4	2	8
Gorontalo Barat ²	3	32	41.559	8,63	82,73	5	2	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





2. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio pertokoan terhadap 10.000 penduduk di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat menempati urutan ke empat sebesar 0,49 dengan nilai 3 (Tabel 40). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato menempati urutan pertama dengan nilai 5.

Tabel 40. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pertokoan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	7	128.495	0,5448	51,54	3	1	3
Gorontalo	20	340.470	0,5874	55,58	3	1	3
Pohuwato ¹	8	74.668	1,0569	100,00	5	1	5
Bone Bolango	5	131.797	0,3794	35,89	3	1	3
Gorontalo Utara	4	96.506	0,4145	39,22	2	1	2
Gorontalo Barat ²	2	41.559	0,4934	46,68	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

3. Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Indikator rasio pasar terhadap jumlah penduduk menunjukkan bahwa calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh nilai paling tinggi sebesar 2,22 dengan skor dan nilai 5 (Tabel 41). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk) menempati urutan kedua dengan skor 4 dan nilai 4. Indikator rasio pasar untuk Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara relatif sama dengan skor dan nilai 3.

Tabel 41. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah Pasar	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	18	128.495	1,4008	63,09	4	1	4
Gorontalo	33	340.470	0,9692	43,65	3	1	3
Pohuwato ¹	13	74.668	1,7175	77,35	4	1	4
Bone Bolango	15	131.797	1,1381	51,26	3	1	3
Gorontalo Utara	10	96.506	1,0362	46,67	3	1	3
Gorontalo Barat ²	9	41.559	2,2204	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

4. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD

Indikator rasio sekolah dasar (SD) atau sederajat terhadap penduduk usia SD sederajat untuk wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 0,0078 dengan





skor dan nilai 5 (Tabel 42). Skor dan nilai ini relatif sama dengan Kabupaten Boalemo dengan rasio 0,0082 dengan skor dan nilai 5. Sedangkan kabupaten paling rendah adalah Pohuwato dengan rasio 0,003 dengan skor dan nilai 2.

Tabel 42. Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SD	Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)					
Boalemo	130	15.737	0,00826	99,87	5	1	5
Gorontalo	311	37.600	0,00827	100,00	5	1	5
Pohuwato ¹	75	24.754	0,00303	36,63	2	1	2
Bone Bolango	131	22.508	0,00582	70,37	4	1	4
Gorontalo Utara	109	21.166	0,00515	62,26	4	1	4
Gorontalo Barat ²	44	5.730	0,00768	92,84	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

5. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP

Indikator sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat terhadap penduduk usia SLTP di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 0,009 bersama-sama Kabupaten Gorontalo dengan nilai dan skor 5 (Tabel 43). Sedangkan kabupaten dengan rasio terendah adalah Bone Bolango dan Pohuwato dengan nilai 1.

Tabel 43. Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SLTP	Penduduk Usia SLTP (13-16 Tahun)					
Boalemo	51	8.305	0,0061	67,43	4	1	4
Gorontalo	111	13.013	0,0085	93,67	5	1	5
Pohuwato ¹	28	23.562	0,0012	13,05	1	1	1
Bone Bolango	35	23.693	0,0015	16,22	1	1	1
Gorontalo Utara	44	21.259	0,0021	22,73	2	1	2
Gorontalo Barat ²	16	1.757	0,0091	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Data di atas menunjukkan bahwa walaupun jumlah sekolah jenjang SLTP di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat relatif sedikit dibandingkan jumlah sekolah tersebut di Kabupaten lainnya tetapi penduduk usia sekolah ini masih relatif mampu dilayani.





6. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA

Indikator sekolah jenjang SLTA atau sederajat terhadap penduduk usia SLTA di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 0,004 dengan skor dan nilai 5 yang merupakan rasio tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 44). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato yang merupakan kabupaten induk menempati urutan terakhir dengan rasio 0,0007 dengan skor dan nilai 1.

Tabel 44. Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SLTA	Penduduk Usia SLTA (16-19 Tahun)					
Boalemo	15	7.014	0,0021	48,19	3	1	3
Gorontalo	29	9.200	0,0032	71,03	4	1	4
Pohuwato ¹	8	11.248	0,0007	16,03	1	1	1
Bone Bolango	15	10.705	0,0014	31,57	2	1	2
Gorontalo Utara	10	10.340	0,0010	21,79	2	1	2
Gorontalo Barat ²	6	1.352	0,0044	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

7. Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 19,74 dengan skor dan nilai 4 yang menempati urutan kedua bersama-sama dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk) relatif lebih baik. Rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 24,56 dengan skor dan nilai 5. Sedangkan rasio terendah diperoleh Kabupaten Gorontalo sebesar 17,89 dengan skor dan nilai 4.

Tabel 45. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	260	128.495	20,23	74,71	4	1	4
Gorontalo	609	340.470	17,89	66,05	4	1	4
Pohuwato ¹	205	74.668	27,08	100,00	5	1	5
Bone Bolango	262	131.797	19,88	73,40	4	1	4
Gorontalo Utara	237	96.506	24,56	90,68	5	1	5
Gorontalo Barat ²	80	41.559	19,74	72,87	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





8. Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk

Indikator rasio tenaga medis (kesehatan) terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan rasio terendah bersama-sama Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato yang masing-masing dengan skor dan nilai 4 (Tabel 46). Sedangkan kabupaten sisanya termasuk Kabupaten dengan perolehan rasio tertinggi dengan skor dan nilai 5.

Tabel 46. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	219	128.495	17,04	86,57	5	1	5
Gorontalo	454	340.470	13,33	67,73	4	1	4
Pohuwato ¹	107	74.668	14,14	71,80	4	1	4
Bone Bolango	182	131.797	13,81	70,14	4	1	4
Gorontalo Utara	190	96.506	19,69	100,00	5	1	5
Gorontalo Barat ²	63	41.559	15,54	78,94	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

9. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor

Pada Indikator ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh rasio sebesar 0,28 dengan skor dan nilai 5. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk) dan kabupaten lainnya memperoleh skor dan nilai 5 yang merupakan skor dan nilai yang tertinggi.

Tabel 47. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah RT Punya Bermotor	Jumlah RT	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	8.909	29.996	0,2970	99,00	5	1	5
Gorontalo	20.095	66.983	0,3000	100,00	5	1	5
Pohuwato ¹	8.241	29.509	0,2793	93,09	5	1	5
Bone Bolango	8.869	31.675	0,2800	93,33	5	1	5
Gorontalo Utara	6.462	23.934	0,2700	90,00	5	1	5
Gorontalo Barat ²	3.014	10.597	0,2844	94,81	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

RT=rumah tangga

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





10. Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

Pada indikator ini, calon wilayah Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh rasio sebesar 0,27 dengan skor dan nilai 3. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (kabupaten induk), Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo memperoleh skor dan nilai yang sama (4) hanya besaran rasionya masih lebih tinggi dari Calon Kabupaten Gorontalo Barat. Kabupaten sisa memperoleh skor dan nilai 5 secara keseluruhan.

Tabel 48. Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah RT	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	9.619	29.996	0,32068	68,17	4	1	4
Gorontalo	31.507	66.983	0,47037	100,00	5	1	5
Pohuwato ¹	10.879	29.509	0,36867	78,38	4	1	4
Bone Bolango	11.831	31.675	0,37351	79,41	4	1	4
Gorontalo Utara	2.645	23.934	0,11051	23,49	2	1	2
Gorontalo Barat ²	2.909	10.597	0,27451	58,36	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

RT=rumah tangga

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

11. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh rasio sebesar 0,03 dengan skor dan nilai 1. Sementara Kabupaten Pohuwato (induk), Kabupaten Bone Bolango memperoleh skor dan nilai 5.

Tabel 49. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	868,93	8.909	0,09753	35,83	2	1	2
Gorontalo	1.315,18	9.112	0,14433	53,03	3	1	3
Pohuwato ¹	1.473,24	6.223	0,23674	86,98	5	1	5
Bone Bolango	957,00	3.516	0,27218	100,00	5	1	5
Gorontalo Utara	578,62	4.524	0,12790	46,99	3	1	3
Gorontalo Barat ²	173	5.431	0,03185	11,70	1	1	1

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





12. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas

Pada indikator ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh rasio sebesar 0,37 dengan skor dan nilai 5 bersama-sama dengan semua kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten dengan persentase tertinggi diperoleh Kabupaten Boalemo sebesar 100%.

Tabel 50. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pekerja SLTA	Jumlah Penduduk ≥ 18 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	38.548,50	86.103	0,44770	100,00	5	1	5
Gorontalo	102.141,00	259.120	0,39418	88,05	5	1	5
Pohuwato ¹	26.254,50	63.793	0,41156	91,93	5	1	5
Bone Bolango	39.539,10	88.947	0,44452	99,29	5	1	5
Gorontalo Utara	35.617,50	80.927	0,44012	98,31	5	1	5
Gorontalo Barat ²	12.160,20	32.340	0,37601	83,99	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

13. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

Pada indikator ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh rasio sebesar 0,21 dengan skor dan nilai 3. Sementara Kabupaten Pohuwato bersama-sama dengan Kabupaten Gorontalo memperoleh skor dan nilai 5. Untuk kabupaten sisa relatif sama dengan perolehan skor dan nilai 4.

Tabel 51. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pekerja S1	Jumlah Penduduk ≥ 25 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	12.849,50	42.392	0,3031	72,42	4	1	4
Gorontalo	34.047,00	81.350	0,4185	100,00	5	1	5
Pohuwato ¹	8.751,50	23.722	0,3689	88,15	5	1	5
Bone Bolango	13.179,70	42.850	0,3076	73,49	4	1	4
Gorontalo Utara	11.872,50	37.798	0,3141	75,05	4	1	4
Gorontalo Barat ²	1.748,00	8.194	0,2133	50,97	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





14. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk

Indikator rasio pegawai negeri sipil (PNS) terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 218,82 dengan skor dan nilai 3. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (induk), skor dan nilainya masih lebih tinggi sebesar 5..

Tabel 52. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah PNS	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2.452	128.495	190,825	41,93	3	1	3
Gorontalo	8.227	340.470	241,637	53,09	3	1	3
Pohuwato ¹	3.445	74.668	455,128	100,00	5	1	5
Bone Bolango	4.003	131.797	303,725	66,73	4	1	4
Gorontalo Utara	1.588	96.506	164,549	36,15	3	1	3
Gorontalo Barat ²	887	41.559	218,829	48,08	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

d. Faktor Kemampuan Keuangan

Beberapa indikator yang digunakan dalam menilai faktor kemampuan keuangan daerah ini terdiri dari: indikator jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS), jumlah PDS terhadap jumlah penduduk, dan jumlah PDS terhadap PDRB non migas.

1. Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS)

Pada indikator ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh skor 2 dengan nilai 10. Sementara Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan skor 1 dan nilai 5 (Tabel 53). Untuk Kabupaten Gorontalo dengan nilai tertinggi (25).

Tabel 53. Indikator Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	39,71	2	5	10
Gorontalo	166.382.915.643	100,00	5	5	25
Pohuwato ¹	53.490.299.077	32,15	2	5	10
Bone Bolango	27.581.720.294	16,58	1	5	5
Gorontalo Utara	31.677.883.411	19,04	1	5	5
Gorontalo Barat ²	33.431.436.923	20,09	2	5	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





2. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk

Indikator jumlah penerimaan PDS terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 824.775,17 dengan skor 5 dan nilai 25 (Tabel 54). Kabupaten Pohuwato memperoleh skor 4 dan nilai 20 saja.

Tabel 54. Indikator Jumlah PDS terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	128.495	514.244,49	62,35	4	5	20
Gorontalo	166.382.915.643	340.470	488.685,98	59,25	3	5	15
Pohuwato ¹	53.490.299.077	74.668	706.674,32	85,68	4	5	20
Bone Bolango	27.581.720.294	131.797	209.274,26	25,37	2	5	10
Gorontalo Utara	31.677.883.411	96.506	328.247,81	39,80	2	5	10
Gorontalo Barat ²	33.431.436.923	41.559	824.775,17	100,00	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

3. Jumlah Penerimaan PDS terhadap PDRB Non Migas

Indikator jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat menunjukkan rasio sebesar 101.10 dengan skor 5 dan nilai 25 (Tabel 55). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk mempunyai skor 4 dan nilai 20.

Tabel 55. Indikator Jumlah PDS terhadap PDRB Non Migas Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	PDRB non Migas (Rp)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	710.770.000	92,97	91,95	5	5	25
Gorontalo	166.382.915.643	1.881.976.000	88,41	87,44	5	5	25
Pohuwato ¹	53.490.299.077	705.783.666	75,79	74,96	4	5	20
Bone Bolango	27.581.720.294	826.050.000	33,39	33,03	2	5	10
Gorontalo Utara	31.677.883.411	473.270.000	66,93	66,20	4	5	20
Gorontalo Barat ²	33.431.436.923	330.661.334	101,10	100,00	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

e. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya terdiri dari: rasio peribadatan, rasio fasilitas olah raga, dan rasio balai pertemuan umum yang dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan PP No.78 Tahun 2007. Uraian secara detail disajikan di bawah ini:





1. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio sarana peribadatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 22,941 dengan skor 5 dan nilai 10 bersama-sama Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato yang merupakan nilai tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 56). Sementara kabupaten sisa, beroleh nilai 8.

Tabel 56. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana Ibadah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	363	128.495	28,25	100,00	5	2	10
Gorontalo	718	340.470	21,09	74,65	4	2	8
Pohuwato ¹	181	74.668	23,91	84,65	5	2	10
Bone Bolango	261	131.797	19,80	70,10	4	2	8
Gorontalo Utara	249	96.506	25,80	91,33	5	2	10
Gorontalo Barat ²	93	41.559	22,94	81,22	5	2	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk

Indikator rasio fasilitas olah raga di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 34,05 dengan skor 2 dan nilai 4. Kabupaten Induk dan Kabupaten Bone Bolango (Tabel 57) memperoleh skor dan nilai tertinggi. Sementara Kabupaten sisa memperoleh skor 4 dan nilai 8.

Tabel 57. Indikator Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	975	128.495	75,88	78,68	4	2	8
Gorontalo	2.154	340.470	63,27	65,60	4	2	8
Pohuwato ¹	711	74.668	93,93	97,40	5	2	10
Bone Bolango	1.271	131.797	96,44	100,00	5	2	10
Gorontalo Utara	673	96.506	69,74	72,31	4	2	8
Gorontalo Barat ²	138	41.559	34,05	35,30	2	2	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

3. Jumlah Balai Pertemuan

Indikator rasio jumlah balai pertemuan umum (BPU) di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 6,66 dengan skor 3 dan nilai 3 (Tabel 58) bersama-sama Kabupaten Pohuwato. Sedangkan rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Bone Bolango dengan skor dan nilai 5.





Tabel 58. Indikator Jumlah Balai Pertemuan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana BPU	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	93	128.495	7,24	55,46	3	1	3
Gorontalo	188	340.470	5,52	42,31	3	1	3
Pohuwato ¹	50	74.668	6,61	50,62	3	1	3
Bone Bolango	172	131.797	13,05	100,00	5	1	5
Gorontalo Utara	63	96.506	6,53	50,02	3	1	3
Gorontalo Barat ²	27	41.559	6,66	51,04	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

f. Faktor Sosial Politik

Pada faktor ini terdiri dari dua indikator yang dinilai, yaitu indikator penduduk yang ikut pemilu legislatif dan jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan uraian berikut ini:

1. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif terhadap Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih

Indikator rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 0,99 (Tabel 59) dan bersama kabupaten lain termasuk Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk merupakan skor dan nilai tertinggi.

Tabel 59. Indikator Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif terhadap Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih

Kabupaten	Jumlah Pemilih	Jumlah Penduduk >17 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	82.805	100.583	0,823	82,58	5	3	15
Gorontalo	184.688	210.067	0,879	88,19	5	3	15
Pohuwato ¹	58.181	70.266	0,828	83,05	5	3	15
Bone Bolango	93.142	101.935	0,914	91,65	5	3	15
Gorontalo Utara	71.042	81.846	0,868	87,07	5	3	15
Gorontalo Barat ²	25.762	25.841	0,997	100,00	5	3	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Indikator persentase jumlah ormas di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 36,50% dengan skor 2 dan nilai 4 (Tabel 60). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo bersama Kabupaten Bone Bolango mempunyai persentase tertinggi dengan skor 5 dan nilai 10.





Tabel 60. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Ormas	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	104	75,91	4	2	8
Gorontalo	122	89,05	5	2	10
Pohuwato ¹	66	48,18	4	2	8
Bone Bolango	137	100,00	5	2	10
Gorontalo Utara	56	40,88	3	2	6
Gorontalo Barat ²	50	36,50	2	2	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Ormas=organisasi kemasyarakatan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

g. Faktor Luas Daerah

Faktor ini terdapat dua indikator, yaitu luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif. Luas keseluruhan merupakan wilayah yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sedangkan luas efektif hanya berupa kawasan budidaya saja.

1. Luas Wilayah Keseluruhan

Pada indikator ini, calon Kabupaten Gorontalo Barat hanya memperoleh skor 4 dan nilai 8 dan hanya berbeda 2 digit dengan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan Kabupaten Boalemo dengan skor 5 dan nilai 10 (Tabel 61).

Tabel 61. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Keseluruhan (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2.567,36	100	5	2	10
Gorontalo	2.124,60	83	5	2	10
Pohuwato ¹	2.453,91	96	5	2	10
Bone Bolango	1.984,58	77	4	2	8
Gorontalo Utara	1.777,03	69	4	2	8
Gorontalo Barat ²	1.790,40	70	4	2	8

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Luas Wilayah Efektif

Indikator persentase luas wilayah efektif calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 73,42% dengan skor 4 dan nilai 12 (Tabel 62). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk memperoleh skor 5 dan nilai 15. Skor dan nilai terendah diperoleh kabupaten sisa yang memperoleh skor 2 dengan nilai 6.





Tabel 62. Indikator Luas Wilayah Efektif Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Efektif (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	494,68	20,48	2	3	6
Gorontalo	860,62	35,62	2	3	6
Pohuwato ¹	2.415,88	100,00	5	3	15
Bone Bolango	658,31	27,25	2	3	6
Gorontalo Utara	612,07	25,34	2	3	6
Gorontalo Barat ²	1.773,82	73,42	4	3	12

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

h. Faktor Pertahanan

Pada faktor ini, terdapat dua indikator yang diukur, yaitu rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah. Masing-masing indikator ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Rasio jumlah personil pertahanan (TNI) di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sampai tahun 2010 mencapai 0,115 dan merupakan rasio tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan rasio ini, maka skor dan nilainya menjadi yang tertinggi, yaitu 5 dan 15. Sementara, rasio aparat pertahanan Kabupaten Boalemo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara relatif sama dengan nilai 15. Hal ini disebabkan luas wilayah kedua kabupaten merupakan yang cukup luas, apalagi Kabupaten pohuwato sebagai kabupaten dengan luas wilayah terbesar di provinsi ini.

Tabel 63. Indikator Jumlah Personil Pertahanan

Kabupaten	Luas (km ²)	Personil	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2.567,36	207	0,0806276	69,22	4	3	12
Gorontalo	2.124,60	207	0,0974301	83,64	5	3	15
Pohuwato ¹	2.453,91	207	0,0843552	72,42	4	3	12
Bone Bolango	1.984,58	207	0,1043042	89,54	5	3	15
Gorontalo Utara	1.777,03	207	0,1164865	100,00	5	3	15
Gorontalo Barat ²	1.790,40	207	0,1156166	99,25	5	3	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Karakteristik Wilayah

Pada indikator ini, semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh skor yang sama, yaitu 2 dan nilai 4 karena semua kabupaten ini merupakan daratan dan tidak berbatasan langsung dengan Negara lain (Tabel 64).





Namun ada beberapa pertimbangan dan menjadi isu strategis terhadap semua kabupaten ini, yaitu:

- a. Semua kabupaten ini mempunyai wilayah pesisir laut yang merupakan pintu masuk segala jenis dan bentuk hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas keamanan dan akhirnya akan mempengaruhi kegiatan seluruh sektor kehidupan, terutama ekonomi, politik, sosial, dan budaya nasional. Wilayah pesisir utara yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Gorontalo Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Sedangkan wilayah pesisir selatan yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Pohuwato, Boalemo, calon Kabupaten Gorontalo Barat, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang berhadapan langsung dengan Teluk Tomini.
- b. Wilayah Barat jazirah Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Pohuwato, Boalemo, calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Gorontalo dilalui jalur jalan trans Sulawesi yang merupakan jalur strategis nasional pemacu perekonomian regional Sulawesi dan Nasional.
- c. Kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan permasalahan klasik dan sistemik yang harus segera mendapatkan prioritas penanganannya, terutama yang mengarah pada konflik akibat keterbatasan peluang dan akses terhadap sumberdaya. Suasana kondusif merupakan faktor utama bergeraknya seluruh aktifitas sektor, sehingga optimalisasi sumberdaya dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lancar, aman dan terkendali.

Tabel 64. Indikator Karakteristik Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Karakteristik	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Gorontalo	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Pohuwato ¹	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Bone Bolango	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Gorontalo Utara	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Gorontalo Barat ²	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





i. Faktor Keamanan

Pada faktor keamanan ini hanya terdapat satu indikator yang diukur, yaitu rasio personil kemananan terhadap jumlah penduduk. Aparat keamanan yang dimaksud dalam indikator ini adalah personil kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di setiap wilayah atau kabupaten dan diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Indikator rasio personil keamanan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sebesar 0,0014 dengan skor 2 dan nilai 10. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk menempati urutan pertama dengan rasio 0,0043 dengan skor 5 dan nilai 25 (Tabel 65). Sedangkan rasio terendah diperoleh tiga kabupaten sisa dengan skor 2 dan nilai 10, kecuali Kabupaten Gorontalo Utara yang masih dalam wilayah Hukum Kepolisian Resort Limboto.

Tabel 65. Indikator Rasio Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Personil	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	128.495	349	0,0027161	62,11	4	5	20
Gorontalo	340.470	524	0,001539	35,19	2	5	10
Pohuwato ¹	74.668	331	0,0043729	100,00	5	5	25
Bone Bolango	131.797	364	0,0027618	63,16	4	5	20
Gorontalo Utara	96.506	221	0,00229	52,37	3	5	15
Gorontalo Barat ²	41.559	60	0,0014802	33,85	2	5	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

j. Faktor Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pada faktor tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks ini merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang (*longetivity*) dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketrampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Uraian lebih detail tentang IPM disajikan berikut ini.





1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator IPM untuk wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat menempati urutan ketiga sebagai IPM tertinggi kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo dengan kontribusi sebesar 97,53% dan hanya selisih 2,743 digit dengan Kabupaten Bone Bolango sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi dan Kabupaten Pohuwato (induk) yang masing-masing sebesar 100% dan 97,53% (Tabel 66). Kabupaten sisa kontribusinya masih lebih besar 90%, sehingga semua kabupaten memperoleh skor dan nilai sama, yaitu skor 5 dan nilai 25.

Tabel 66. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Kabupaten/Kota	IPM	Kontribusi (%)	Skor	Bobot	Nilai
Boalemo	68,03	95,56	5	5	25
Gorontalo	69,55	97,70	5	5	25
Pohuwato ¹	69,43	97,53	5	5	25
Bone Bolango	71,19	100,00	5	5	25
Gorontalo Utara	68,41	96,09	5	5	25
Gorontalo Barat ²	69,43	97,53	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Data IPM tersebut, walaupun semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Gorontalo Barat memperoleh nilai 25 (tertinggi), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kecamatan yang tergolong kecamatan dengan IPM terendah. Upaya pembentukan kabupaten baru ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan IPM pada semua kecamatan dengan IPM terendah, tidak terkecuali kecamatan di wilayah calon kabupaten ini.

k. Faktor Rentang Kendali

Pada faktor ini, terdapat dua indikator yang menjadi tolok ukur penilaian, yaitu rata-rata jarak kabupaten ke ibu kota provinsi dan rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten ke ibu kota provinsi. Uraian masing-masing indikator disajikan berikut.

1. Rata-Rata Jarak Kabupaten ke Pusat Pemerintahan (Ibukota Provinsi)

Indikator jarak calon Kabupaten Gorontalo Barat ke pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi (Kota Gorontalo) persentasenya sebesar 100% yang memperoleh skor 5 dan nilai 10 (Tabel 67). Sementara untuk Kabupaten Pohuwato (induk) persentasenya juga relatif tinggi karena memang jaraknya yang relatif jauh sebesar





64,23%. Persentase jarak yang paling rendah diperoleh Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebesar 6,50% dengan skor 1 dan nilai 2. Sedangkan Kabupaten Boalemo persentasenya sebesar 42,68%.

Tabel 67. Indikator Rata-Rata Jarak Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Rentang Kendali/Kabupaten	Jarak (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Gorontalo-Tilamuta (Boalemo)	105	42,68	3	2	6
Gorontalo-Limboto (Gorontalo) ¹	16	6,50	1	2	2
Gorontalo-Marisa (Pohuwato)	158	64,23	4	2	8
Gorontalo-Suwawa (Bone Bolango)	14	5,69	1	2	2
Gorontalo-Kwandang (Gorontalo Utara)	57	23,17	2	2	4
Gorontalo-Popayato (Gorontalo Barat) ²	246	100,00	5	2	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten ke Pusat Pemerintahan

Indikator rata-rata waktu perjalanan dari calon Kabupaten Gorontalo Barat menuju ibu kota provinsi persentasenya sebesar 100% dengan skor 5 dan nilai 15 (Tabel 68). Sementara persentase paling rendah diperoleh dua kabupaten dengan indikator rata-rata jarak kabupaten menuju ibu kota provinsi.

Tabel 68. Indikator Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain

Rentang Kendali/Kabupaten	Waktu (jam)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Gorontalo-Tilamuta (Boalemo)	2,5	50,00	3	3	9
Gorontalo-Limboto (Gorontalo) ¹	0,5	10,00	1	3	3
Gorontalo-Marisa (Pohuwato)	3	60,00	4	3	12
Gorontalo-Suwawa (Bone Bolango)	0,25	5,00	1	3	3
Gorontalo-Kwandang (Gorontalo Utara)	1	20,00	2	3	6
Gorontalo-Popayato (Gorontalo Barat) ²	5	100,00	5	3	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Rekapitulasi Faktor Persyaratan Teknis Pembentukan Kabupaten

Berdasarkan nilai masing-masing indikator dalam setiap faktor yang menjadi persyaratan teknis pembentukan kabupaten, maka calon Kabupaten Gorontalo Barat mempunyai total nilai akhir sebesar 361 dan menempati urutan ke empat sebagai kabupaten yang **mampu** serta **direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru (Tabel 69). Total nilai akhir tertinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo





dengan nilai sebesar 413. Sementara Kabupaten Pohuwato sebagai kabupaten induk memperoleh nilai sebesar 378 yang masih termasuk mampu serta tetap dipertahankan sebagai sebuah kabupaten mandiri. Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara masing-masing memperoleh nilai 395 dan 353. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango berada pada titik kritis sebagai sebuah kabupaten dengan total nilai 317 (syarat mampu sebesar 340 sesuai PP no. 78 tahun 2007).

Tabel 69. Rekapitulasi Faktor Persyaratan Teknis Calon Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Faktor	Nilai Faktor Kabupaten					
	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato ¹	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Gorontalo Barat ²
Kependudukan	95	100	50	45	90	50
Kemampuan Ekonomi	50	65	60	60	50	55
Potensi Daerah	59	64	61	56	53	61
Kemampuan Keuangan	55	65	50	25	35	60
Sosial Budaya	21	19	23	23	21	17
Sosial Politik	23	25	23	25	21	19
Luas Daerah	16	16	25	14	14	20
Pertahanan	16	19	16	19	19	19
Keamanan	20	10	25	20	15	10
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25	25	25
Rentang Kendali	15	5	20	5	10	25
Nilai Akhir	395	413	378	317	353	361

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Data dan informasi hasil rekapitulasi terhadap nilai faktor persyaratan teknis di atas, menunjukkan bahwa pada beberapa faktor terdapat indikator yang ketersediaan data indikator sangat minim, sehingga menurunkan perolehan skor dan nilai. Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan di wilayah tersebut. Upaya pembentukan kabupaten baru merupakan strategi untuk melakukan akselerasi pembangunan wilayah. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan sebuah kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2007, sehingga wajar jika ketersediaan indikator penilaian masih terbatas karena masih sementara membangun wilayahnya.





3.3.2 Persyaratan Fisik Kewilayahan

a. Cakupan Wilayah Kabupaten

Calon Kabupaten Gorontalo Barat secara administratif terdiri dari 5 (lima) kecamatan definitif. Kelima kecamatan definitif tersebut terdiri dari:

1. Kecamatan Wanggarasi

Wanggarasi merupakan salah satu kecamatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat yang saat ini terdiri dari 7 desa dengan status desa swadaya. Desa-desanya di kecamatan ini, meliputi: Desa Wonggarasi Timur, Bukit Harapan, Bohusami, Lembah Permai, Limbula, Tuweya, dan Desa Yipilo.

2. Kecamatan Lemito

Lemito merupakan salah satu kecamatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat yang saat ini terdiri dari 8 desa dengan status desa swadaya. Desa-desanya di kecamatan ini, meliputi: Desa Lomuli, Lemito, Wonggarasi Barat, Kenari, Lemito Utara, Wonggarasi Tengah, Suka Damai dan Desa Balobalongge.

3. Kecamatan Popayato Timur

Popayato Timur merupakan salah satu kecamatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat yang saat ini terdiri dari 7 desa dengan status desa swadaya. Desa-desanya di kecamatan ini, meliputi: Desa Maleo, Bunto, Tahele, Marisa, Londoun, Milangodaa, dan Desa Kelapa Lima.

4. Kecamatan Popayato

Popayato merupakan salah satu kecamatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat yang saat ini terdiri dari 10 desa dengan status desa swadaya. Desa-desanya di kecamatan ini, meliputi: Desa Popayato, Trikora, Telaga, Bukit Tinggi, Tunas Harapan, Dambalo, Torosiaje, Torosiaje Jaya, dan Desa Bumi Bahari.

5. Kecamatan Popayato Barat

Popayato Barat merupakan salah satu kecamatan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat yang saat ini terdiri dari 7 desa dengan status desa swadaya. Desa-desanya di kecamatan ini, meliputi: Desa Molosipat, Dudewulo, Tunas Jaya, Padengo, Molosipat Utara, Persatuan, dan Desa Butungale.





b. Calon Ibu kota Kabupaten

Penentuan calon ibu kota calon Kabupaten Gorontalo Barat didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu aspek kesesuaian lahan, aspek persyaratan teknis, dan aspek hirarki pengembangan wilayah. Uraian masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kesesuaian Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman

Penilaian kesesuaian lahan untuk perkantoran dan pemukiman dilakukan dengan asumsi bahwa bangunan tersebut tidak melebihi tiga lantai (Tabel 70). Penentuannya didasarkan pada kemampuan lahan dalam menopang pondasi dan beban bangunan di atasnya.

Tabel 70. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman

Kriteria/Parameter Lahan	Kesesuaian Lahan		
	Baik	Sedang	Buruk
Sub siden total (cm)	-	-	>30
Banjir	tanpa	tanpa	jarang-sering
Air Tanah	> 75	45-75	<45
Nilai Cole (Kembang-Kerut)	Rendah	Sedang	Tinggi
Lereng (%)	<8	8-15	>15
Kedalaman Hampan Batuan:			
Keras	>100	50-100	<50
Lunak	>50	<50	-
Kedalaman Padas Keras (cm):			
Tebal	>100	50-100	<50
Tipis	>50	<50	-
Batuan/Kerikil (>7,5 cm) (% berat)	<25	25-50	>50
Longsor	-	-	ada

Sumber: USDA (1983) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007).

Sifat-sifat lahan yang berpengaruh adalah daya dukung tanah dan sifat-sifat tanah lain yang berpengaruh terhadap biaya penggalian dan konstruksi nantinya. Sifat-sifat tanah, seperti kerapatan jenis (*bulk density*), bahaya banjir, tata air (*wetness*), plastisitas, tekstur, dan potensi mengembang (*swelling*)-mengkerut (*shrinking*) tanah berpengaruh terhadap daya dukung tanah. Sedangkan biaya penggalian dan konstruksi nantinya akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman tanah, tata air, lereng, hampan batuan sampai keadaan batuan permukaan (USDA, 1971).

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan di atas, maka beberapa parameter lahan dapat diinterpretasi berdasarkan satuan formasi geologi wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Parameter nilai cole, bantuan/kerikil, hampan batuan, kedalaman padas, termasuk air tanah dapat diinterpretasi dari satuan formasi geologi. Semua





wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat tidak ditemukan kemungkinan amblesan (*subsiden*). Untuk parameter banjir relatif kecil kemungkinan terjadi karena disamping perbedaan tinggi yang cukup nyata juga telah tersedia fasilitas drainase baik saluran irigasi maupun saluran pembuangan lainnya (Tabel 71). Kandungan air tanah semua wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat juga relatif dalam (>75 cm), sehingga genangan yang mungkin terjadi karena jenuh air juga relatif kecil. Berdasarkan formasi satuan geologi (Bahcri *et al.* 1993), maka wilayah Kecamatan Wanggarasi itu didominasi oleh formasi **batuan gunung api pinogu (Tqpv)** yang terdiri dari aglomerat, tuf, lava, dan andesit-basal. Sementara Wilayah Kecamatan Lemito, Popayato Timur dan Kecamatan Popayato didominasi formasi **endapan danau (Qpl)** yang terdiri dari batu liat, batu pasir dan kerikil.

Tabel 71. Nilai Parameter Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman

Kriteria	Kecamatan				
	Wanggarasi	Lemito	Popayato Timur	Popayato	Popayato Barat
Sub siden total (cm)	-	-	-	-	-
Banjir	tanpa	tanpa	tanpa	tanpa	Tanpa
Air Tanah (cm)	> 75	> 75	> 75	> 75	>75
Nilai Cole (Kembang-Kerut)*	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Lereng (%)	8-14	3-8	3-8	3-8	3-8
Kedalaman Hampan Batuan:					
Keras	>100	>100	>100	>100	>100
Lunak	>50	>50	>50	>50	>50
Kedalaman Padas Keras cm):					
Tebal	>100	>100	>100	>100	>100
Tipis	>50	>50	>50	>50	>50
Batuan/Kerikil (>7,5 cm) (%berat)	<25	<25	<25	<25	<25

Keterangan: * berdasarkan formasi geologi (Bahcri *et al.* 1993)

Sumber: Hasil Survei Lapang Tim Kajian Daerah (2011).

Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa semua parameter untuk semua kecamatan adalah baik. Berdasarkan uraian kesesuaian lahan untuk perkantoran dan pemukiman tersebut, maka semua kecamatan mempunyai kelas kesesuaian lahan **baik**. Perencanaan pembangunan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sepatutnya mempertimbangkan aspek-aspek, sebagaimana yang tertera dalam kriteria sebelumnya, terutama yang berkaitan erat dengan formasi geologi. Hal ini penting karena proses geologi sampai saat ini masih berlangsung walaupun masih pada skala kecil dan belum dirasakan dampaknya secara luas.





Tabel 72. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Perkantoran dan Pemukiman di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

No	Kriteria	Kesesuaian Lahan				
		Wanggarasi	Lemito	Popayato Timur	Popayato	Popayato Barat
1	Sub siden total (cm)	baik	baik	baik	baik	baik
2	Banjir	baik	baik	baik	baik	baik
3	Air Tanah (cm)	baik	baik	baik	baik	baik
4	Nilai Cole (Kembang-Kerut)	baik	baik	baik	baik	baik
5	Lereng (%)	baik	baik	baik	baik	baik
6	Kedalaman Hampan Batuan:					
	Keras	baik	baik	baik	baik	baik
	Lunak	baik	baik	baik	baik	baik
7	Kedalaman Padas Keras (cm):					
	Tebal	baik	baik	baik	baik	baik
	Tipis	baik	baik	baik	baik	baik
8	Batuan/Kerikil (>7,5 cm) (% berat)	baik	baik	baik	baik	baik
Kesesuaian Lahan Akhir		baik	baik	baik	baik	baik

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

2. Aspek Hirarki Pengembangan Wilayah

Wilayah didefinisikan sebagai area geografis yang mempunyai ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Dari definisi tersebut, dapat diturunkan tipologi-tipologi wilayah berdasarkan sifat hubungannya, fungsi masing-masing komponennya atau berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi maupun politis lainnya. Diantara tipologi-tipologi yang ada terdapat salah satu tipologi yang disebut dengan tipologi wilayah *nodal*, yang merupakan pengembangan dari konsep sel hidup. Dalam penjabaran wilayah *nodal* ini, wilayah diasumsikan sebagai suatu sel hidup yang terdiri dari inti dan plasma, yang masing-masing mempunyai fungsi yang saling mendukung. Inti dalam hal ini diasumsikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pusat ekonomi serta pusat inovasi. Sedangkan plasma atau *hinterland* merupakan pusat pemasok bahan mentah, tenaga kerja, dan pusat pemasaran.

Berdasarkan konsep wilayah *nodal* tersebut, pusat atau *hinterland* suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan **jumlah** dan **jenis** fasilitas umum dan jumlah penduduknya. Unit wilayah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas umum dan jumlah penduduk dengan kuantitas dan kualitas yang secara relatif paling lengkap dibandingkan dengan unit wilayah yang lain akan menjadi pusat atau mempunyai hirarki lebih tinggi. Sebaliknya, jika suatu wilayah mempunyai jumlah dan jenis





fasilitas umum serta jumlah penduduk dengan kuantitas dan kualitas paling rendah merupakan wilayah *hinterland* dari unit wilayah yang lain. Dengan cara ini, selanjutnya dapat ditentukan hirarki dari seluruh unit wilayah dalam suatu cakupan administrasi wilayah yang lebih luas.

Analisis hirarki pengembangan wilayah dengan metode skalogram terhadap wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat (Tabel 73) memperlihatkan bahwa penyebaran jumlah dan jenis sarana prasarana umum wilayah tersebar secara tidak merata di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat. Hal ini terlihat dari kecenderungan timpangnya dan hanya memusatnya sarana prasarana umum di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato dan Kecamatan Lemito. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nilai indeks pengembangan kecamatan (IPC).

Tabel 73. Hasil Analisis Hirarki Pengembangan Wilayah di Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Indeks Perkembangan Kecamatan (IPC)					Jumlah Jenis	Hirarki Pengembangan Wilayah
			Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Sosial	Fasilitas Ekonomi	Total		
Wanggarasi	4.787	271,10	4,95	4,78	4,23	7,87	21,84	25	III
Lemito	10.921	136,01	6,91	4,51	3,63	7,04	22,10	27	II
Popayato Timur	8.099	723,74	2,89	2,09	2,31	5,71	13,00	25	V
Popayato	9.842	80,57	9,33	7,88	1,34	5,33	23,88	28	I
Popayato Barat	7.910	578,98	6,61	1,29	1,29	7,15	16,34	24	IV
Jumlah	41.559	1.790,40	30,70	20,55	12,81	33,10	97,17		

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Hasil analisis hirarki pengembangan wilayah menunjukkan bahwa IPC fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi paling tinggi diperoleh Kecamatan Popayato dan Kecamatan Lemito (Tabel 73). Untuk IPC fasilitas pendidikan dan ekonomi paling rendah diperoleh Kecamatan Popayato Timur. Selanjutnya untuk IPC fasilitas kesehatan dan IPC fasilitas sosial paling rendah diperoleh Kecamatan Popayato Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka IPC tertinggi diperoleh Kecamatan Popayato dan Kecamatan Lemito. IPC total paling rendah diperoleh Kecamatan Popayato Timur. Dengan demikian, hirarki pengembangan wilayah paling tinggi (hirarki I) diperoleh Kecamatan Popayato. Sementara hirarki II diperoleh Kecamatan Lemito, hirarki III diperoleh Kecamatan Wanggarasi, dan hirarki IV diperoleh Kecamatan Popayato Barat. Sedangkan hirarki V atau yang paling rendah diperoleh Kecamatan Popayato Timur





3. Aspek Persyaratan Teknis Calon Ibu Kota

Penilaian calon ibu kota Kabupaten Gorontalo Barat didasarkan pada empat aspek penilaian utama, yaitu: aspek ruang, aspek kependudukan, aspek potensi daerah dan aspek sosial budaya. Pada masing-masing aspek terdiri dari indikator dan sub indikator penilaian sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PP No.78 Tahun 2007. Uraian masing-masing aspek disajikan sebagai berikut:

a. Aspek Ruang

Berdasarkan aspek ruang, indeks jarak dan waktu ke pusat pemerintahan paling jauh diperoleh Kecamatan Popayato Barat dan paling dekat diperoleh Kecamatan Lemito (Tabel 74). Indeks luas lahan efektif dan luas keseluruhan paling tinggi diperoleh Kecamatan Popayato Timur dan paling rendah diperoleh Kecamatan Popayato. Sedangkan indeks jarak sumber air relatif sama untuk semua kecamatan.

Tabel 74. Hasil Analisis Ruang Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Indeks Rata-rata Jarak ke Pusat Pemerintahan	Indeks Rata-rata Waktu ke Pusat Pemerintahan	Indeks Rata-rata Jarak ke Ibu Kota Kabupaten terdekat	Indeks Luas Lahan Budidaya/Efektif	Indeks Luas Keseluruhan	Indeks Jarak Sumber Air	Rata-Rata Indeks
Wanggarasi	98,16	100,00	65,61	33,29	37,46	100	72,42
Lemito	61,35	74,07	74,72	19,10	18,79	100	58,01
Popayato Timur	80,98	82,30	79,28	100,00	100,00	100	90,43
Popayato	49,69	80,81	95,03	15,38	11,13	100	58,67
Popayato Barat	100,00	92,59	100,00	91,45	80,00	100	94,01

Sumber: Hasil Analisis Tim Kajian Daerah (2011).

b. Aspek Kependudukan

Nilai indeks kependudukan tertinggi diperoleh Kecamatan Lemito sebesar 90,49 dan paling rendah Kecamatan Wanggarasi sebesar 71,63 (Tabel 75).

Tabel 75. Hasil Analisis Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Indeks Jumlah Penduduk	Indeks Jumlah PNS	Indeks Tenaga Kerja Produktif	Indeks Penduduk Bekerja	Rata-Rata Indeks
Wanggarasi	43,26	43,26	100	100	71,63
Lemito	100,00	100,00	67,85	94,09	90,49
Popayato Timur	72,48	72,48	72,24	94	77,80
Popayato	91,67	91,67	68,83	97,88	87,51
Popayato Barat	63,01	63,01	72,29	89,37	71,92

Sumber: Hasil Analisis Tim Kajian Daerah (2011).

c. Aspek Potensi Daerah

Berdasarkan aspek potensi daerah, maka untuk semua indeks paling tinggi diperoleh Kecamatan Popayato sebesar 78,31 (Tabel 76). Untuk indeks terendah diperoleh Kecamatan Popayato Barat yang hanya 53,52





Tabel 76. Hasil Analisis Potensi Daerah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Indeks Sarana dan Prasarana Transportasi	Indeks Lembaga Keuangan	Indeks Sarana dan Prasarana Ekonomi	Indeks Sarana Pendidikan	Indeks Sarana Kesehatan	Indeks Sarana Ibadah	Indeks Sarana Olah Raga	Rata-Rata Indeks
Wanggarasi	72,54	79,46	50,00	68,00	100	73,91	43,70	69,66
Lemito	100,00	22,92	100,00	96,00	29	100,00	100,00	78,25
Popayato Timur	68,54	47,43	50,00	72,00	57	91,30	70,07	65,17
Popayato	85,96	100,00	50,00	100,00	29	91,30	91,67	78,31
Popayato Barat	72,83	27,28	25,00	76,00	39	73,91	60,36	53,52

Sumber: Hasil Analisis Tim Kajian Daerah (2011).

d. Aspek Sosial Budaya

Berdasarkan aspek sosial budaya, maka semua indikator dengan nilai indeks paling tinggi diperoleh Kecamatan Popayato sebesar 72,91 (Tabel 77). Sementara itu, indeks terendah diperoleh Kecamatan Popayato Barat yang hanya 51,48 saja.

Tabel 77. Hasil Analisis Sosial Budaya Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Indeks Jumlah Wajib Pilih	Indeks Ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan	Rata-Rata Indeks
Wanggarasi	45,81	71,43	58,62
Lemito	45,81	85,71	65,76
Popayato Timur	45,81	71,43	58,62
Popayato	45,81	100,00	72,91
Popayato Barat	45,81	57,14	51,48

Sumber: Hasil Analisis Tim Kajian Daerah (2011).

Berdasarkan empat aspek penilaian dalam persyaratan teknis calon ibu kota Kabupaten Gorontalo Barat, maka nilai rata-rata indeks tertinggi diperoleh Kecamatan Popayato sebesar 74,35 dan menempatkan Kecamatan Popayato sebagai peringkat I sebagai calon ibu kota Kabupaten Gorontalo Barat (Tabel 78). Sedangkan nilai indek terendah diperoleh Kecamatan Popayato Barat yang hanya sebesar 67,73 yang menempatkan kecamatan ini sebagai peringkat V.

Tabel 78. Rekapitulasi Persyaratan Teknis Calon Ibukota Kabupaten Gorontalo Barat

Kecamatan	Aspek Ruang	Aspek Jumlah Penduduk	Aspek Potensi Daerah	Aspek Sosial Budaya	Rata-Rata Indeks	Rangking
Wanggarasi	72,42	71,63	69,66	58,62	68,08	IV
Lemito	58,01	90,49	78,25	65,76	73,13	II
Popayato Timur	90,43	77,80	65,17	58,62	73,00	III
Popayato	58,67	87,51	78,31	72,91	74,35	I
Popayato Barat	94,01	71,92	53,52	51,48	67,73	V

Sumber: Hasil Analisis Tim Kajian Daerah (2011).





3.4 Kesimpulan

- a. Berdasarkan persyaratan teknis pembentukan kabupaten, maka calon Kabupaten Gorontalo Barat mempunyai total nilai akhir sebesar **361** dan **mampu** serta **direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru.
- b. Berdasarkan persyaratan fisik wilayah, maka untuk syarat cakupan wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat sudah mempunyai **lima kecamatan definitif**. Dengan demikian, maka calon Kabupaten Gorontalo Barat **layak** untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru.
- c. Berdasarkan persyaratan fisik wilayah, untuk syarat calon ibu kota Kabupaten Gorontalo Barat dengan pertimbangan aspek kesesuaian lahan untuk perkantoran dan pemukiman, aspek hirarki pengembangan wilayah, dan aspek persyaratan teknis calon ibu kota, maka calon ibu kota Kabupaten Gorontalo Barat yang diusulkan adalah wilayah **Kecamatan Popayato** (peringkat 1), **Kecamatan Lemito** (peringkat 2), **Kecamatan Popayato Timur** (peringkat 3), **Kecamatan Wanggarasi** (peringkat 4), dan **Kecamatan Popayato Barat** (peringkat 5).





KAJIAN DAERAH

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT DI PROVINSI GORONTALO

B

ab IV. Kajian Keunggulan & Analisis SWOT



B AB IV KAJIAN KEUNGGULAN WILAYAH DAN ANALISIS SWOT CALON KABUPATEN GORONTALO BARAT

4.1 Keunggulan Wilayah

4.1.1 Rasionalisasi Kajian

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah tidak hanya dibatasi oleh karena adanya introduksi industri baru di suatu kawasan, tetapi terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut secara alamiah (Isard, 1975). Potensi alamiah suatu wilayah, baik itu potensi bio-fisik, sosio-ekonomis dan kelembagaan di suatu wilayah mempunyai peran yang cukup penting dalam mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan secara alamiah. Potensi alamiah yang didalamnya termasuk karakteristik bio-fisik akan mempengaruhi keunggulan atau ketidak unggulan suatu wilayah terhadap wilayah lain. Potensi alamiah ini akan mempengaruhi harga-harga barang di suatu wilayah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi struktur biaya produksi suatu barang di suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah yang lain. Disamping itu sistem kelembagaan adat akan mempengaruhi perbedaan produktifitas di suatu wilayah. Perkembangan jaringan tata niaga di suatu wilayah juga berperan dalam mempengaruhi keunggulan dan ketidak unggulan komparatif suatu wilayah terhadap wilayah lain. *Economic positioning* suatu wilayah terhadap wilayah lain, dalam mencari ukuran kuantitatif kesiapan wilayah tersebut untuk berkembang maju tidak selalu menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan. Namun demikian, untuk menilai daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lainnya, maka keunggulan kompetitif wilayah ini perlu diketengahkan sebagai informasi dan tambahan bahan kajian pembentukan kabupaten ini.

4.1.2 Metodologi dan Pendekatan

a. Analisis Keunggulan Komparatif Wilayah

Location Quotient

Daya saing ekonomi calon kabupaten, salah satunya diukur dari koefisien lokasi (*Location Quotient*), yaitu dengan mengukur nilai tambah suatu sektor dari wilayah terhadap nilai tambah suatu sektor dari Wilayah terhadap nilai tambah sektor yang sama dari perekonomian di Kabupaten Induk. Secara sistimatis dirumuskan sebaga berikut :





$$LQ = \left\{ \frac{VA_i^p / \sum VA^p}{VA_i^s / \sum VA^s} \right\}$$

Dimana : LQ = koefisien location quotient, VA = value added, $\sum VA$ = total value added, i = sektor usaha, p = kabupaten baru (Kabupaten Gorontalo Barat), s=kabupaten Induk/provinsi gorontalo, dengan catatan, apabila: $LQ > 1$ = wilayah tersebut mempunyai keunggulan Komparatif, dan $LQ < 1$ = wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan Komparatif.

b. Analisis Keunggulan Kompetitif Wilayah

Shift-Share

Shift-share analysis merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis *shift-share* juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas dalam cakupan wilayah lebih luas. Hasil analisis *shift-share* menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam wilayah total. Analisis *shift-share* mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu: sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), sebab dari dinamika aktifitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum. Persamaan analisis *shift-share* ini adalah sebagai berikut :

$$SSA = \underbrace{\left(\frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 \right)}_a + \underbrace{\left(\frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} \right)}_b + \underbrace{\left(\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} \right)}_c$$

Dimana: a = komponen *share*, b = komponen *proportional shift*, c = komponen *differential shift*, dan $X_{..}$ = Nilai total aktifitas dalam total wilayah, $X_{.i}$ = Nilai total aktifitas tertentu dalam total wilayah, X_{ij} = Nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu, t1 = titik tahun akhir, serta t0 = titik tahun awal.

4.1.3 Hasil dan Pembahasan

4.1.3.1 Analisa Keunggulan Komparatif

Location quotions (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktifitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total





aktifitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama.

Tabel 79. Hasil Analisis Location Quotations Calon Kabupaten Gorontalo Barat Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (2000-2009)

Sektor	2008	2009
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	1,33	1,38
Pertambangan & Penggalian	0,79	0,75
Industri Pengolahan	1,08	1,24
Listrik, Gas & Air	1,28	1,26
Bangunan	1,56	1,54
Perdagangan, Hotel & Restoran	1,37	1,34
Pengangkutan & Komunikasi	0,42	0,39
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,77	1,73
Jasa-Jasa	0,21	0,22
PDRB	1,09	1,09

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2010).

Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebagai sektor utama dan andalan wilayah ini merupakan sektor basis atau memusat pengembangannya di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat dengan nilai LQ sebesar 1,38 atau >1 (Tabel 79). Sektor lain yang merupakan basis di wilayah ini yaitu: industri pengolahan, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ masing-masing sebesar 1,24; 1,54; 1,34; dan 1,73. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut ($LQ > 1$) mempunyai keunggulan komparatif di wilayah ini dibanding wilayah lainnya. Sedangkan sektor lainnya relatif menyebar atau bukan merupakan sektor basis ($LQ < 1$), seperti pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Dengan kata lain bahwa sektor-sektor ini tidak mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan di daerah ini.

4.1.3.2 Analisis Keunggulan Kompetitif

Shift-share analysis (SSA) merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis *shift-share* juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas





dalam cakupan wilayah lebih luas. Hasil analisis *shift-share* menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam wilayah total. Analisis *shift-share* mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu: sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), sebab dari dinamika aktifitas/sector (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum.

Tabel 80. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2008-2009) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat, Provinsi Gorontalo

Sektor	PDRB Kab. Gorontalo Barat		PDRB Prov Gorontalo		Pertumbuhan Ekonomi
	2008	2009	2008	2009	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	63.123,58	67.353,78	778.836	800.870	6,70
Pertambangan dan Penggalian	799,78	861,34	26.194	29.976	7,70
Industri Pengolahan	4.467,00	4.865,28	201.693	209.079	8,92
Listrik, Gas dan Air Bersih	543,29	565,95	14.384,00	15.320,00	4,17
Bangunan	16.467,87	17.936,74	203.232,00	232.712,00	8,92
Perdagangan, Restoran dan Hotel	13.632,70	14.543,52	344.057,00	373.894,00	6,68
Pengangkutan dan Komunikasi	4.060,51	4.284,89	258.800,00	282.499,00	5,53
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13.798,92	14.834,51	215.129,00	234.615,00	7,50
Jasa-Jasa	5.415,58	6.012,54	483.348,00	531.773,00	11,02
P D R B	122.309,23	131.258,56	2.525.673,00	2.710.738,00	7,32

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2010).

Analisis keunggulan kompetitif dengan metode SSA terhadap calon Kabupaten Gorontalo Barat menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2008-2009) dan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ini (Tabel 80). Hasil SSA ini diharapkan bisa digunakan untuk membandingkan tingkat pertumbuhan aktifitas sektor di calon Kabupaten Gorontalo Barat dibandingkan secara relatif dengan tingkat pertumbuhan aktifitas sektor di Provinsi Gorontalo di antara dua titik tahun 2008 dan 2009. Hasil analisis ini akan diketahui dinamika cakupan yang mana yang menjadi penyebab utama pergeseran (peningkatan atau penurunan) tersebut. Kemungkinan penyebabnya adalah dinamika yang terjadi di dalam Kabupaten Gorontalo Barat sendiri, dinamika sektor tertentu di Provinsi Gorontalo, atau dinamika di Provinsi Gorontalo.





Tabel 81. Hasil Analisis *Shift-Share* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2008-2009) di Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat, Provinsi Gorontalo

Sektor	Share	Shift Proporsional	Shift Differensial	Total
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,0732	-0,0861	0,9943	0,9813
Pertambangan dan Penggalian	0,0732	-0,0725	1,0035	1,0042
Industri Pengolahan	0,0732	-0,0759	1,0149	1,0122
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,0732	-0,0732	0,9707	0,9706
Bangunan	0,0732	-0,0678	1,0149	1,0203
Perdagangan, Restoran dan Hotel	0,0732	-0,0715	0,9941	0,9958
Pengangkutan dan Komunikasi	0,0732	-0,0714	0,9833	0,9851
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,0732	-0,0718	1,0018	1,0031
Jasa-Jasa	0,0732	-0,0684	1,0345	1,0393
Rataan	0,0732	0,0000	1,0013	1,0013

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2010).

Hasil SSA terhadap calon Kabupaten Gorontalo Barat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRBnya di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 0,0732. Selanjutnya, semua sektor di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat mempunyai laju pertumbuhan PDRB lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan total di Provinsi Gorontalo (0,0733). Sedangkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat mempunyai tingkat *competitiveness* (keunggulan kompetitif) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Oleh karena itu pengembangan sektor tersebut di calon kabupaten ini akan sangat menguntungkan.

Tingkat pertumbuhan PDRB sektor pertanian 0,981 lebih rendah 0,1 digit dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor pertanian secara umum di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, sektor industri pengolahan dan bangunan mempunyai keunggulan kompetitif yang relatif besar dalam arti akan berkontribusi secara kompetitif di calon Kabupaten Gorontalo Barat jika dikembangkan sektor-sektor tersebut dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 1,012 dan 1,020 dibanding pertumbuhan sektor-sektor tersebut di Provinsi Gorontalo. Hal demikian juga berlaku pada pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, Listrik dan sektor pengangkutan serta komunikasi. Sektor-sektor yang pertumbuhan PDRBnya lebih rendah dibanding pertumbuhan sektor tersebut di Provinsi Gorontalo antara lain, yaitu: pertambangan dan penggalian, dan pengangkutan.





4.1.4 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil analisis keunggulan komparatif, maka wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat **unggul secara komparatif** atau merupakan basis sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan; Pengangkutan dan Komunikasi; serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- b. Berdasarkan hasil analisis keunggulan kompetitif, maka wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat **unggul secara kompetitif** di sektor pertanian, bangunan dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Oleh karena itu pengembangan sektor tersebut di calon kabupaten ini akan sangat menguntungkan.

4.2 Analisis SWOT Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat

Secara sepintas dapat dikemukakan Analisis SWOT terhadap eksistensi Kabupaten Gorontalo Barat, sebagai modal dasar dalam mengembangkan kawasan Gorontalo Barat sebagai Calon Kabupaten Baru di jazirah Provinsi Gorontalo. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat* atau Analisis terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan dari Kabupaten Gorontalo Barat), yang uraian deskripsinya dapat dikemukakan berikut ini:

A. Kekuatan

Analisis terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo Barat, antara lain adalah:

1. Jumlah penduduk yang relatif masih sedikit sebagai kekuatan utama untuk dikembangkan menjadi sumberdaya manusia yang potensial dalam mendukung pembangunan dan pengembangan daerah.
2. Luas wilayah yang secara administratif dapat dikembangkan lagi baik dalam bentuk pemekaran kecamatan dan desa maupun untuk kepentingan pengembangan zona peruntukkan wilayah sangat terbuka dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai potensi kawasannya.
3. Tingginya motivasi berusaha penduduk dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi melalui aktivitas usaha *home industry* dan sector riil lainnya.
4. Luas lahan produktif di wilayah calon kabupaten Gorontalo Barat yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan diarahkan pada berbagai kegiatan sector ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Komposisi penduduk dari perspektif asal suku (Jawa, Bali, Sunda : 54% dari eksistensi suku yang mendiami wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat), menjadi kekuatan utama dalam memajukan kabupaten Baru. Penduduk pribumi (suku Gorontalo) termotivasi bersama suku pendatang dalam membangun kawasan Gorontalo Barat.





6. Keterbukaan penduduk terhadap berbagai etnis lain dan semangat pembaharuan merupakan modal dasar yang terpenting terhadap tercapainya tujuan pemekaran daerah.
7. Wilayah perkebunan dan pertanian yang terbuka luas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat local dalam kerangka peningkatan kesejahteraan penduduk, dan juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
8. Dengan potensi wilayah dan dukungan sumber daya manusia yang ada di wilayah Calon kabupaten Gorontalo Barat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara mandiri dalam perspektif otonomi daerah, dan dengan tetap menjaga keutuhan NKRI.

B. Kelemahan

Kekuatan yang ditemui di wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat, antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tidak seimbang antar kecamatan dapat memicu munculnya ketimpangan perkembangan daerah.
2. Tingkat pendidikan penduduk yang rata-rata masih rendah, dikhawatirkan tidak akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perkembangan social, ekonomi, politik, teknologi dan globalisasi.
3. Meskipun terdapat jiwa wirausaha, namun kemampuan wirausaha masyarakat masih rendah, sehingga kurang mampu mengantisipasi peluang usaha yang lebih prospektif.
4. Mata pencaharian penduduk masih terbatas pada sektor-sektor konvensional yang dilakukan secara turun temurun atau sekedar ikut-ikutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana perhubungan dan transportasi dalam mempercepat akselerasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kawasan yang jauh dari pusat-pusat jasa dan layanan.

C. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah calon kabupaten Gorontalo Barat, antara lain:

1. Semakin terbukanya kesempatan dan lapangan kerja baru.
2. Kewenangan yang dimiliki kabupaten dapat diarahkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya secara optimal, serta kemudahan aksesibilitas bagi pengembangan usaha oleh para entrepreneur lokal maupun calon investor.
3. Keinginan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan perbaikan pola hidup, sebagai pemicu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Masyarakat dengan kultur yang heterogen memiliki sikap yang lebih terbuka dalam menerima perubahan.
5. Memiliki kawasan perkebunan dan pertanian yang potensinya menjadi penyanggah perekonomian di jazirah provinsi Gorontalo.





D. Tantangan

Calon kabupaten Gorontalo Barat berhadapan dengan tantangan yang mungkin timbul akan tetapi dapat menjadi peluang di masa mendatang, antara lain:

1. Pendetang tenaga kerja atau pemilik modal yang dapat menguasai sektor strategis sehingga memarginalkan masyarakat lokal yang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah, dan tentunya komunitas masyarakat ini belum siap dengan perkembangan informasi dan teknologi akibat golablisasi.
2. Pengembangan kawasan yang akan terjadi pada skala yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan sosial budaya dan fisik lingkungan.
3. Kawasan yang sebagian terbuka tentunya akan berdampak pada gangguan keamanan masyarakat.





KAJIAN DAERAH

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT

DI PROVINSI GORONTALO

B ab V. Penutup



B AB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan wilayah yang potensial dan produktif untuk dikembangkan sebagai sentra pengembangan beberapa sektor pembangunan, terutama sektor pertanian, bangunan, keuangan, jasa dan lainnya.
- b. Kontribusi Calon Kabupaten Gorontalo Barat terhadap perekonomian wilayah Gorontalo cukup signifikan, dan kelak akan menjadi penyanggah utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi provinsi Gorontalo, dan lebih khusus lagi bahwa Kabupaten Gorontalo Barat memiliki kontribusi dalam peningkatan PAD dan nilai PDRB. Selain itu, wilayah ini merupakan salah satu kawasan perbatasan yang layak dan patut untuk dikembangkan lebih baik lagi ke depan.
- c. Hasil penilaian persyaratan teknis wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat termasuk dalam kategori **mampu** dan **direkomendasikan** untuk dibentuk sebuah kabupaten baru. Sementara, hasil analisis keunggulan wilayah ini mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di beberapa sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan Nasional, sehingga prospek ke depan tidak diragukan lagi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian dari hasil kajian akademis dan kesimpulan di atas, maka Tim Penyusun Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat, merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Calon Kabupaten Gorontalo Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Pohuwato **mampu menjadi Daerah Otonom Baru sebagai Kabupaten Definitif**, dengan tetap menjunjung tinggi empat pilar utama dalam pri kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni : 1) Pancasila, 2) Undang-Undang Dasar 1945, 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4) Bhineka Tunggal Ika.
- b. Bahwa oleh karena itulah, maka segenap masyarakat di wilayah Gorontalo Barat secara bersama-sama menyatukan tekad dan niat untuk lebih maju sejajar dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Gorontalo dan nasional dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat di Provinsi Gorontalo.





KAJIAN DAERAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT
DI PROVINSI GORONTALO

D Aftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S., Nata Suharta, A.B. Siswanto, Irawan. 2002. Modul Pewilayahan Komoditas (MPK). Versi 1.2. Puslitbang Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Evaluasi Kebijakan Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB. Direktorat Otoda Bappenas-Jakarta.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2006. Desentralisasi sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 18 Maret 2006.
- Brodjonegoro, B. P.S. 2006. Jumlah Daerah Otonom Ideal: Perspektif Ekonomi, Keuangan dan Pendapatan Daerah. Disampaikan dalam Diskusi Penataan Daerah Departemen Dalam Negeri, 16 November 2006, Jakarta.
- BPS Kabupaten Gorontalo. 2010. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, Limboto.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kecamatan Wanggarasi Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kecamatan Lemito Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kecamatan Popayato Timur Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kecamatan Popayato Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2010. Kecamatan Popayato Barat Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Marisa.
- BPS Provinsi Gorontalo. 2010. Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- BPS Kabupaten Gorontalo Utara. 2010. Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, Kwandang.
- BPS Kabupaten Boalemo. 2010. Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, Tilamuta.
- BPS Kabupaten Bone Bolango. 2010. Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, Suwawa.
- Departemen Dalam Negeri. 2005. Sinopsis Penelitian: Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah. Pusat Litbang Otonomi Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Djaenudin, D. 1995. Evaluasi Lahan Menggunakan Program ALES Studi Kasus Di Daerah Marisa/Popayato, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam : Prosiding Pertemuan Pembahasan dan Komunikasi Penelitian Tanah dan Agroklimat. Buku II Bidang Potensi Sumber Daya Lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.





- FAO. 1996. Agro-ecological zoning guidelines. FAO Soil Bulletin 73. Rome.
- FAO. 1976. A Framework of Evaluation. FAO Soil Bulletin No.6, Rome.
- Fitriani, F., Hofman B. and K. Kaser. 2005. Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia. Bulletin of Indonesia Studies.
- Hardjowigeno, S dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi kesesuaian lahan dan perencanaan tata guna lahan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Isard, W. 1975. Introduction to regional science. Prentice-Hal Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Jaweng, R dan T. Ratnawati. 2005. Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah. Jentera: Jurnal Hukum 10 (3): 60-73.
- Kuncoro, M. 2003. Otonomi dan Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oldeman, L.R, and Darmiyati S., 1977. The Agroclimatic Map of Sulawesi, scale 1: 2,500,000. Contr. Centre. Res. Inst. Agric. Bulletin No.60, Bogor.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil Amandemen ke-4.
- Pramono, Sidik dan Susie Berindra. 2006. Pemekaran Tak Lagi Jadi “Obat” Mujarab. KOMPAS- Rabu, 30 Agustus 2006. In http://groups.google.co.id/group/mahasiswa/browse_thread/thread/=Permasalahan+pemekaran+daerah#dc0d7d7e8b0ea40f
- Ratnawati, T. 2005. Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah: Revisi Mendasar Terhadap PP 129 Tahun 2000. Jakarta : Yayasan Harkat Bangsa.
- UNDP. 2008. Gorontalo Human Development Index 2008. Laporan Kerjasama UNDP dengan Bappeda Provinsi Gorontalo, Gorontalo.





KAJIAN DAERAH

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO BARAT DI PROVINSI GORONTALO

Lampiran



Lampiran 1. Data Dasar Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Pohuwato (induk) dan Calon Kabupaten Gorontalo Barat

1.1. PDRB Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2009 (Juta Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
	2	3
<i>1</i>		
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	265.010,96	303.081,44
Pertambangan & Penggalian	3.470,49	4.049,31
Industri Pengolahan	32.177,85	38.477,48
Listrik, Gas & Air Bersih	4.462,22	4.850,68
Bangunan	17.281,96	20.666,84
Perdagangan, Hotel & Restoran	84.980,32	97.148,69
Pengangkutan & Komunikasi	21.968,57	24.538,57
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	49.476,69	57.505,58
Jasa-Jasa	124.594,20	155.465,08
PDRB	603.423,26	705.783,67

Sumber: Kabupaten Pohuwato dalam Angka (2010)

1.2. PDRB Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2009 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
	2	3
<i>1</i>		
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	141.241,56	150.166,22
Pertambangan & Penggalian	2.148,71	1.222,66
Industri Pengolahan	24.524,94	10.290,72
Listrik, Gas & Air Bersih	3.440,11	1.197,05
Bangunan	18.331,15	10.438,26
Perdagangan, Hotel & Restoran	60.957,43	30.761,48
Pengangkutan & Komunikasi	12.437,54	9.063,11
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	25.065,19	14.584,49
Jasa-Jasa	42.104,94	47.097,46
PDRB	330.251,57	274.821,44

Sumber: Kabupaten Pohuwato dalam Angka (2009)

1.3. PDRB Calon Kabupaten Gorontalo Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2009 (Juta Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
	2	3
<i>1</i>		
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	118.864,88	135.940,56
Pertambangan & Penggalian	2.444,91	2.852,69
Industri Pengolahan	15.213,16	18.191,52
Listrik, Gas & Air Bersih	2.109,66	2.293,32
Bangunan	29.696,72	35.513,16
Perdagangan, Hotel & Restoran	40.177,30	45.930,31
Pengangkutan & Komunikasi	10.386,38	11.601,43
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	50.324,89	58.491,42
Jasa-Jasa	15.905,89	19.846,92
PDRB	287.135,79	330.661,33

Sumber: Kabupaten Pohuwato dalam Angka (2010)





1.4. PDRB Calon Kabupaten Gorontalo Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2009 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
1	2	3
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Peternakan	63.123,58	67.353,78
Pertambangan & Penggalian	799,78	861,34
Industri Pengolahan	4.467,00	4.865,28
Listrik, Gas & Air Bersih	543,29	565,95
Bangunan	16.467,87	17.936,74
Perdagangan, Hotel & Restoran	13.632,70	14.543,52
Pengangkutan & Komunikasi	4.060,51	4.284,89
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	13.798,92	14.834,51
Jasa-Jasa	5.415,58	6.012,54
PDRB	122.309,23	131.258,56

Sumber: Kabupaten Pohuwato dalam Angka (2010)

1.5. PDRB Provinsi Gorontalo menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2009 (Juta Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	1.847.552	2.096.062
Pertambangan & Penggalian	63.845	81.256
Industri Pengolahan	290.688	311.694
Listrik, Gas & Air Bersih	34.203	38.903
Bangunan	394.779	491.634
Perdagangan, Hotel & Restoran	605.304	730.347
Pengangkutan & Komunikasi	509.211	628.917
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	586.786	721.620
Jasa-Jasa	1.567.419	1.949.179
P D R B	5.899.787	7.082.611

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (2010)

1.6. PDRB Provinsi Gorontalo menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2009 (Juta Rupiah)

Sektor	Tahun	
	2008	2009
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	778.836	800.870
Pertambangan & Penggalian	26.194	29.976
Industri Pengolahan	201.693	209.079
Listrik, Gas & Air Bersih	14.384	15.320
Bangunan	203.232	232.712
Perdagangan, Hotel & Restoran	344.057	373.894
Pengangkutan & Komunikasi	258.800	282.499
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	215.129	234.615
Jasa-Jasa	483.348	531.773
P D R B	2.525.673	2.710.737

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (2010)





Lampiran 2. Hasil Penilaian terhadap Faktor dan Indikator Pembentukan Kabupaten Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007

Faktor dan Indikator	Kabupaten/Nilai Indikator					
	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato ¹	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Gorontalo Barat ²
Kependudukan	95	100	50	45	90	50
Jumlah Penduduk	75	75	45	30	75	45
Kepadatan Penduduk	20	25	5	15	15	5
Kemampuan Ekonomi	50	65	60	60	50	55
PDRB non migas perkapita	15	15	25	20	15	25
Pertumbuhan ekonomi	25	25	25	25	25	25
Kontribusi PDRB non migas	10	25	10	15	10	5
Potensi Daerah	59	64	61	56	53	61
Rasio Bank dan Lembaga non keuangan bank per 10.000 penduduk	8	10	10	8	8	10
Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	3	3	5	3	2	3
Rasio pasar per 10.000 penduduk	4	3	4	3	3	5
Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	5	5	2	4	4	5
Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	4	5	1	1	2	5
Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	3	4	1	2	2	5
Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	4	4	5	4	5	4
Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	5	4	4	4	5	4
Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	5	5	5	5	5	5
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	4	5	4	4	2	3
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	2	3	5	5	3	1
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	5	5	5	5	5	5
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	4	5	5	4	4	3
Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk	3	3	5	4	3	3
Kemampuan Keuangan	55	65	50	25	35	60
Jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS)	10	25	10	5	5	10
Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	20	15	20	10	10	25
Rasio PDS terhadap PDRB non migas	25	25	20	10	20	25
Sosial Budaya	21	19	23	23	21	17
Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	10	8	10	8	10	10
Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	8	8	10	10	8	4
Jumlah balai pertemuan	3	3	3	5	3	3
Sosial Politik	23	25	23	25	21	19
Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif yang mempunyai hak pilih	15	15	15	15	15	15
Jumlah organisasi kemasyarakatan	8	10	8	10	6	4
Luas Daerah	16	16	25	14	14	20
Luas wilayah keseluruhan	10	10	10	8	8	8
Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	6	6	15	6	6	12
Pertahanan	16	19	16	19	19	19
Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	12	15	12	15	15	15
Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	4	4	4	4	4	4
Keamanan	20	10	25	20	15	10
Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	20	10	25	20	15	10
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25	25	25
Indeks pembangunan manusia (IPM)	25	25	25	25	25	25
Rentang Kendali	15	5	20	5	10	25
Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	6	2	8	2	4	10
Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	9	3	12	3	6	15
Total	395	413	378	317	353	361

¹ Kabupaten Induk

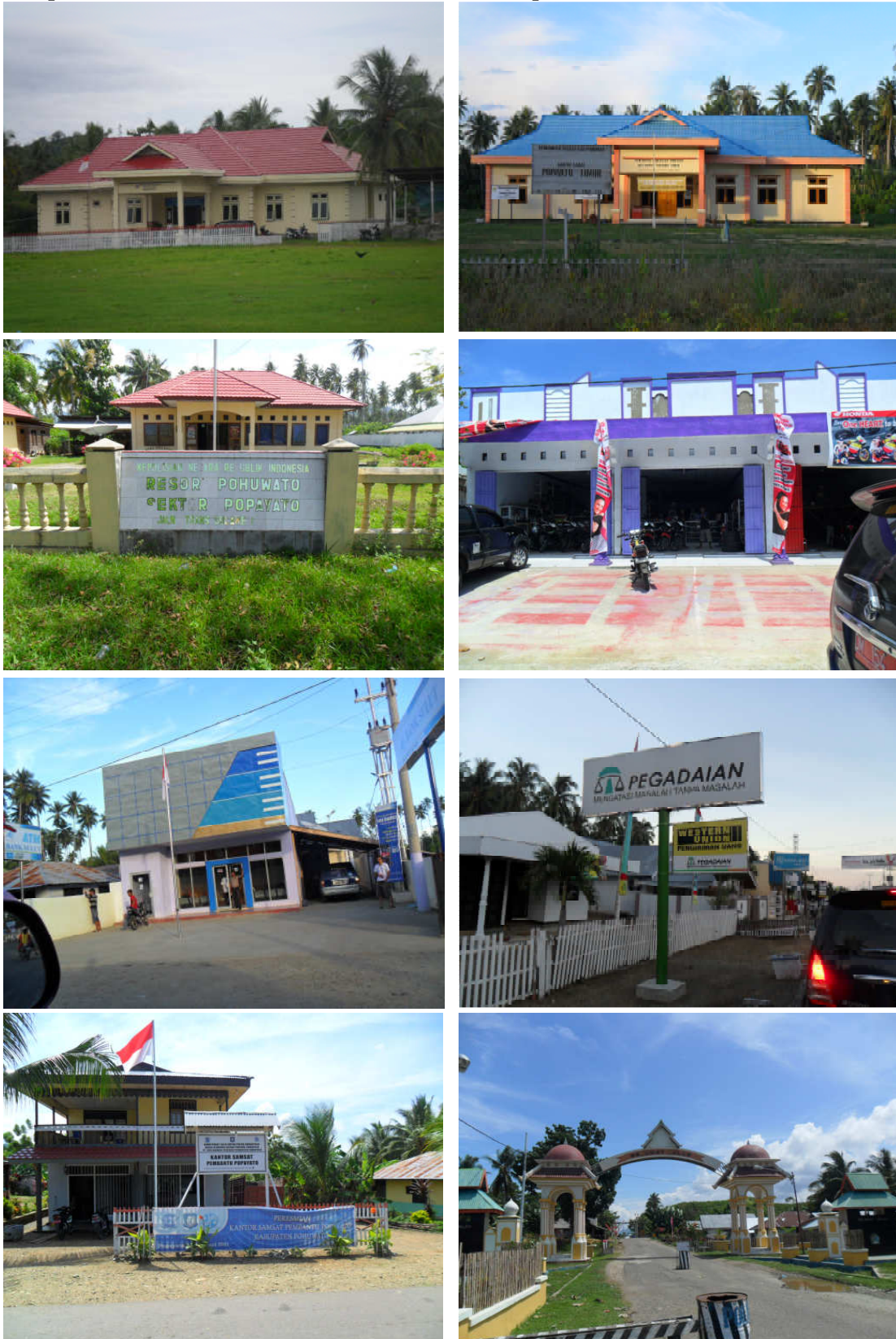
² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Kajian Daerah (2011).





Lampiran 3: Dokumentasi Kondisi Aktual Calon Kabupaten Gorontalo Barat



Potret Infrastruktur Wilayah





Lampiran 4: Potensi Wilayah Calon Kabupaten Gorontalo Barat



Potret Potensi Sumberdaya Pertanian (Pertanian, Perikanan dan Kelautan)





Lampiran 5: Aktifitas Perjuangan Pembentukan Calon Kabupaten Gorontalo Barat



**Suasana Rapat Bersama Seluruh Masyarakat
(Aula Kantor Camat Popayato)**

